



**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROGRAM PENATAAN
LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS LANJUTAN
(STUDI DESA KARANGGEGER KECAMATAN PAJARAKAN
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2015-2016)**

*Women's Participation In Community-based Environmental Settelement Program
(Study On Karanggeger Village, Pajarakan Sub-distict, Probolinggo District At
2015-2016)*

SKRIPSI

Oleh:

Iin Isnaini Sulistiyasmoko

NIM 110910201043

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROGRAM PENATAAN
LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS LANJUTAN
(STUDI DESA KARANGGEGER KECAMATAN PAJARAKAN
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2015-2016)**

*Women's Participation In Community-based Environmental Settelement Program
(Study On Karanggeger Village, Pajarakan Sub-distict, Probolinggo District At
2015-2016)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh:

Iin Isnaini Sulistiyasmoko

NIM 110910201043

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah saya panjatkan puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh pengorbanan dan doa-doa tulus tiada henti dari orang-orang tersayang. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, Ibu Muntiah dan (Alm) Bapak Sugiadmoko yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang, semangat, motivasi, nasihat dan doa yang tiada henti selama ini.
2. Saudara-saudaraku tercinta Mike Febriantasmoko dan Nur Muhammad Andreasmoko yang telah memberikan perhatian, semangat, dan doa.
3. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, yang telah mendidik, memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat berarti.
4. Almater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang kubanggakan.

MOTTO

“FASTABIQUL KHAIRAT”
(Berlomba-lombalah berbuat kebajikan)¹



¹Al Kitab, QS. Al Baqaroh: 148 dan Al Maa'idah: 48

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : In Isnaini Sulistiyasmoko

NIM : 110910201043

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Partisipasi Perempuan Dalam Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Lanjutan (Studi Desa Karanggeger Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2016) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Mei 2018

Yang menyatakan,

In Isnaini Sulistiyasmoko

NIM 110910201043

PENGESAHAN

Skripsi “Partisipasi Perempuan Dalam Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Lanjutan (Studi Desa Karanggeger Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2016)” telah diuji dan disahkan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 08 Juni 2018

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Selfi Budi Helpiastuti, M.Si

NIP. 197003221995122001

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si

NIP. 19580510197022001

Dra. Inti Wasiati, MM

NIP. 195307311980022001

Anggota

Abul Haris Suryo N., S.IP, M.Si

NIP. 198210292015041001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si

NIP. 195808101987021002

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROGRAM PENATAAN
LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS LANJUTAN
(STUDI DESA KARANGGEGER KECAMATAN PAJARAKAN
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2015-2016)**

*Women's Participation In Community-based Environmental Settelement Program
(Study On Karanggeger Village, Pajarakan Sub-distict, Probolinggo District At
2015-2016)*

SKRIPSI

Oleh:

Iin Isnaini Sulistiyasmoko

NIM 110910201043

Pembimbing:

Pembimbing I : Dr. Anastasia Murdyastuti, M. Si

Pembimbing II : Dra. Inti Wasiati, M.M

RINGKASAN

Partisipasi Perempuan Dalam Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Lanjutan (Study Desa Karanggeger Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2016); In Isnaini Sulistiyasmoko; 110910201043; 2018; 104 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara; Jurusan Ilmu Administrasi; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi perempuan dalam program penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas lanjutan di Desa Karanggeger Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2016. Peneliti tertarik mengambil topik ini dikarenakan pelaksanaan program penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas lanjutan di Desa Karanggeger dianggap berhasil secara hasil pembangunannya namun, dalam hal keterlibatan perempuan masih dianggap rendah karena belum mencapai 40%, sedangkan ketentuan indikator pelaksanaan keterlibatan perempuan harus mencapai 40%. Pembangunan desa atau pelaksanaan program yang bersifat pembenahan infrastruktur sering kali didominasi oleh dunia laki-laki. Hal ini terkait pandangan masyarakat bahwa pembangunan infrastruktur berhubungan dengan pekerjaan kasar, buruh bangunan atau kuli bangunan. Masyarakat sering kali salah mengartikan bahwa pembangunan yang hanya pantas dikerjakan laki-laki. Masih kurang pemahannya masyarakat bahwa dalam pelaksanaan suatu program pembangunan infrastruktur melalui banyak tahapannya, dimulai dari tahap perencanaan kegiatan, tahap penganggaran dana, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Sehingga dalam hal ini bukan hanya laki-laki saja yang bisa terlibat namun pihak perempuan juga bisa terlibat dan memang dibutuhkan keterlibatannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana partisipasi perempuan dalam Program Penataan Lingkungan Permukiman Lanjutan Di Desa Karanggeger Tahun 2015-2016. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Karanggeger Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Peneliti menggunakan teknik *snowball* sebagai teknik informan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji validitas data yang digunakan triangulasi dan analisis datanya menggunakan analisis interaktif.

Hasil penelitian partisipasi Perempuan dalam Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Lanjutan (Studi Desa Karanggeger Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2016), bahwa perempuan bukan hanya penikmat hasil pembangunan, namun mereka berperan aktif dalam pengambilan keputusan, pembangunan, pemanfaatan hasil dan mengembangkan hasil dalam pembangunan. Dengan adanya partisipasi perempuan lebih maju tersebut jika dilihat dari analisis Gender Longwe dimana pada dimensi Kesejahteraan perempuan sudah ikut terlibat secara penuh guna untuk membangun kesejahteraan lingkungan yang ada, sehingga terciptanya keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Sedangkan pada dimensi Akses bahwa dalam program PLPBK lanjutan dengan pembangunan 100% akses air 0% pemukiman kumuh 100% sanitasi tidak adanya senjangan akses bagi kaum perempuan sehingga akses yang didapatkan laki-laki dan perempuan itu sama. Selanjutnya pada dimensi kesadaran kritis dimana sebagian kaum perempuan sudah sadar bahwa keterlibatan mereka sangat penting dalam pembangunan. Dan yang terakhir adalah dimensi partisipasi perempuan secara aktif menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan nilai serta pengembangan nilai pembangunan.

PRAKATA

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa, atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: “Partisipasi Perempuan Dalam Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Lanjutan (Studi Desa Karanggeger Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dan dapat berjalan dengan lancar tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Siselaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Akhmad Toha, M,Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Dr. Sutomo,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
4. Nian Riawati.Sos.,MPA selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat, bimbingan, dukungan dan arahan dalam menempuh perkuliahan.
5. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing, meluangkan waktu, pikiran dan pengarahan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
6. Dra. Inti Wasiati, M.M selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing, meluangkan waktu, pikiran dan pengarahan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.

7. Dosen-dosen dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang memberi ilmu pengetahuan dan bantuan selama penulis kuliah.
8. Lukman Hakim yang sudah seperti Menjadi Orang Tua ku serta bisa menjadi seorang Kakak terimakasih banyak atas semua bimbingannya.
9. Zeni Musafa yang sudah menjadi seorang kakak yang selalu membimbing.
10. Pihak instansi KOTAKU Kabupaten Probolinggo yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan bantuan baik secara lisan maupun tertulis demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat-Sahabati PMII FISIP Unej terimakasih atas pembelajarannya.
12. Seluruh Keluarga Besarku MPA MAPALUS, selalu memberikan pelajaran hidup akan melewati badai kehidupan.
13. Teman-teman seperjuanganku Administrasi Negara 2011.
14. Yanuar Budi Ananda yang selalu menjadi teman Diskusi dalam berbagai hal.

Semoga amal baik semua pihak yang sudah membantu penulis akan mendapat balasan dari Allah Yang Maha Esa, penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin.

Jember, 15 Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian	17
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1 Pembangunan	20
2.2 Program PLPBK Lanjutan Tahun 2015-2016.....	25
2.3 Gender dan Pembangunan	31
2.4. Partisipasi Perempuan.....	34
2.4.1 Pengertian partisipasi	34
2.4.2 Partisipasi Perempuan Dalam pembangunan	36

2.5 Analisis Gender	37
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Jenis Penelitian	43
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	44
3.3 Data dan Sumber Data	45
3.4 Penentuan Informan Penelitian	46
3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data	48
3.6 Teknik Penyajian dan Analisis Data	50
3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data.....	53
BAB 4. HASIL dan PEMBAHASAN	54
4.1 Deskripsi Daerah penelitan	54
4.2 Program PLPBK Lanjutan	59
4.2.1 Tahap persiapan.....	59
4.2.2 Tahap riview program investasi	63
4.2.3 Tahap pelaksanaan.....	67
4.2.4 Tahap pengelolaan.....	70
4.2.5 Tahap keberlanjutan.....	71
4.3 Partisipasi Perempuan dalam program PLPBK Lanjutan.....	73
4.3.1 Partisipasi perempuan sebagai pengusulan	73
4.3.2 Partisipasi perempuan sebagai pengambilan keputusan.....	74
4.3.3 Partisipasi perempuan sebagai pelaksanaan kegiatan	77
4.3.4 Partisipasi perempuan sebagai pemantau	78
4.3.5 Partisipasi perempuan sebagai pemelihara.....	81
4.3.6 Partisipasi perempuan sebagai penerima manfaat.....	85
4.4 Pembahasan	85
5.1 Penutup.....	92
Daftrap Pustaka.....	94

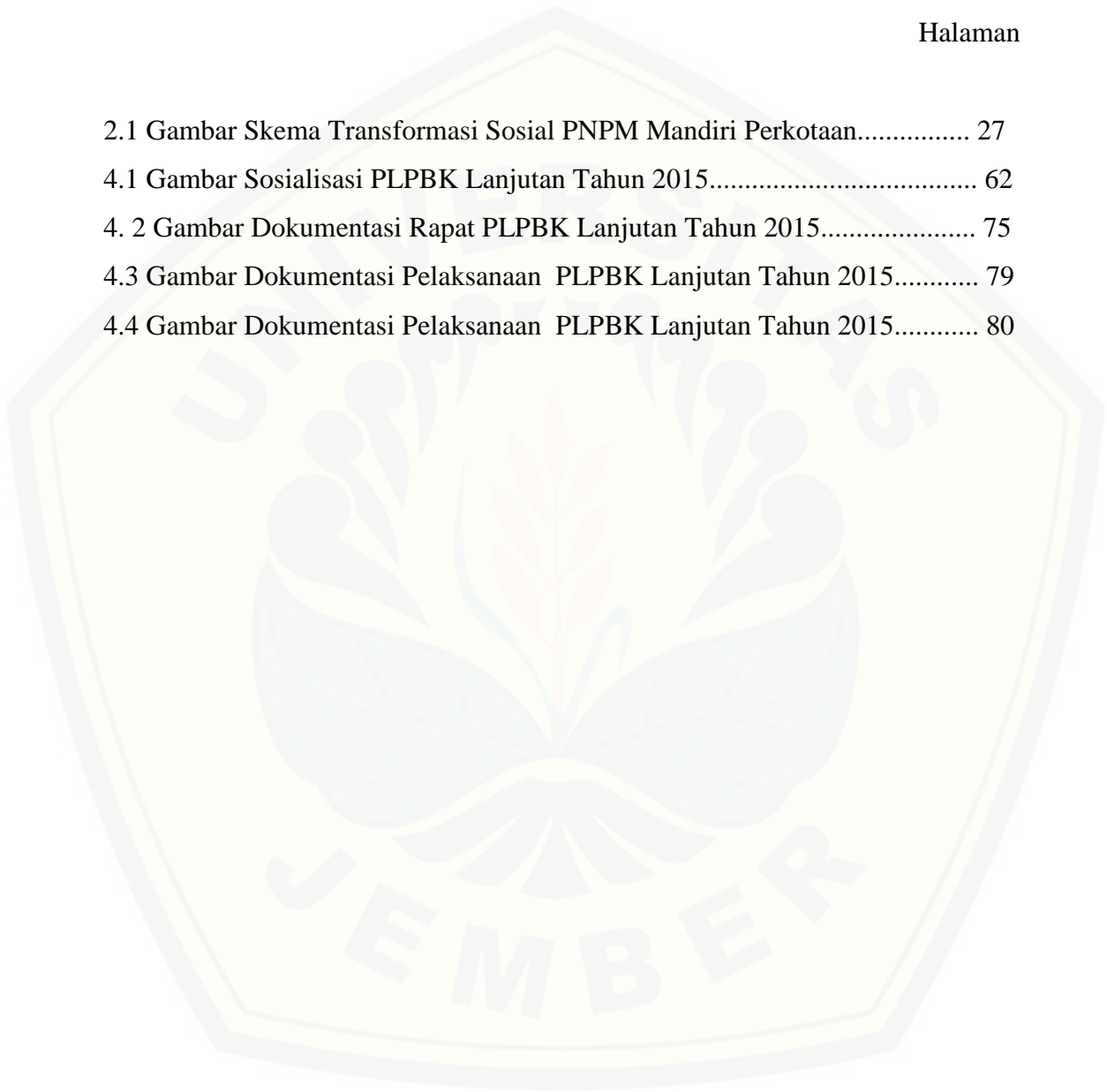
DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Tabel Hasil Pembangunan PLPBK lanjutan Karanggeger Tahun 2015.....	10
1.2 Tabel Tingkat Partisipasi Laki-laki dan Perempuan Tahun 2015.....	14
2.1 Tabel Perbandingan Karakteristik Tiga Paradigma Pembangunan.....	21
3.3 Penentuan informan	47
4.1 Tabel Luas wilayah Desa Karanggeger Tahun 2015.....	55
4.2 Tabel Jumlah penduduk Desa Karanggeger tahun 2015 berdasarkan Gender.....	56
4.3 Tabel Pertumbuhan penduduk Desa Karanggeger tahun 2015.....	57
4.4 Tabel Mata Pencaharian Penduduk Desa Karanggeger tahun 2015.....	57
4.5 Tabel Tingkat Pendidikan Desa Karanggeger tahun 2015.....	58
4.6 Tabel Fasilitas Pendidikan Desa Karanggeger tahun 2015.....	59
4.7 Tabel KSM Desa Karanggeger tahun 2014.....	68

DAFTAR GAMBAR

Halaman

2.1 Gambar Skema Transformasi Sosial PNPM Mandiri Perkotaan.....	27
4.1 Gambar Sosialisasi PLPBK Lanjutan Tahun 2015.....	62
4. 2 Gambar Dokumentasi Rapat PLPBK Lanjutan Tahun 2015.....	75
4.3 Gambar Dokumentasi Pelaksanaan PLPBK Lanjutan Tahun 2015.....	79
4.4 Gambar Dokumentasi Pelaksanaan PLPBK Lanjutan Tahun 2015.....	80



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi perempuan dalam program penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas lanjutan (PLPBK lanjutan) di Desa Karanggeger Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2016. Peneliti tertarik mengambil topik ini dikarenakan pelaksanaan program penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas lanjutan di Desa Karanggeger dianggap berhasil secara hasil pembangunannya namun, dalam hal keterlibatan perempuan masih dianggap rendah karena belum mencapai 40%, sedangkan ketentuan indikator pelaksanaan keterlibatan perempuan harus mencapai 40%.

Partisipasi perempuan dapat ditinjau melalui 6 bentuk yaitu, sebagai pengusul, sebagai pengambil keputusan, sebagai pelaksana kegiatan, sebagai pemantau, sebagai pemelihara dan sebagai penerima manfaat. Dari enam bentuk inilah dapat dilihat sejauh mana partisipasi perempuan dalam program penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas lanjutan (PLPBK lanjutan) di Desa Karanggeger. Dalam pelaksanaannya enam bentuk partisipasi perempuan di Desa Karanggeger secara keseluruhan sudah terpenuhi namun, pada bentuk sebagai pelaksana kegiatan masih ada persoalan. Pelaksanaan kegiatan sendiri terbagi menjadi tiga kegiatan yang pertama pra kegiatan dimana yang dilakukan adalah membentuk pengurus, sosialisali, musyawarah program dan menyelesaikan administrasi. Selanjutnya kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan fisik dan pasca kegiatan yang dilakukan adalah mengerjakan laporan pertanggungjawaban.

Persoalan yang pertama adalah pada pembentukan pengurus dimana keterlibatan perempuan harusnya mencapai 40% namun nyatanya tidak mencapai 40% lalu, dalam kehadiran saat sosialisasi dan perencanaan kegiatan juga masih belum mencapai 40%. Berikut ini data jumlah persentase yang partisipasi laki-laki dan perempuan Desa Karanggeger:

Tabel 1.1 Partisipasi Laki-laki dan Perempuan Desa Karanggeger Tahun 2015

Agenda	Laki-laki		Perempuan	
	Jumlah orang	Persentase	Jumlah orang	persentase
Sosialisasi	39 orang	77%	12 orang	23%
Perencanaan Kegiatan	31 orang	89%	4 orang	11%
Pengurus LKM	7 orang	64%	4 orang	36%
Pengurus KSM	6 orang	86%	1 orang	14%

Sumber kantor wilayah KOTAKU Probolinggo 21 Januari 2017 (data telah diolah)

Sehingga Fakta di lapangan menunjukkan bahwa adanya kesenjangan pada partisipasi perempuan dimana pada kegiatan sosialisasi yang hadir sejumlah 51 orang dengan jumlah persentase 77% laki-laki dan 23% perempuan, kegiatan selanjutnya pada perencanaan kegiatan persentasenya 89% laki-laki dan 11% perempuan. Bukan hanya itu saja dalam keterlibatan menjadi pengurus LKM jumlah pengurus 11 orang dengan 64% laki-laki dan 36% perempuan, begitupun dengan pengurus KSM jumlah pengurus 86% laki-laki dan 14% perempuan. Dari ini dapat kita lihat bahwa keberhasilan program PLPBK Lanjutan pada Desa Karanggeger hanya dilihat secara umum saja untuk capaian keterlibatan perempuan harus mencapai 40% nyatanya masih belum tercapai. Dari data diatas dapat kita pahami data daftar hadir saat sosialisasi dan perencanaan kegiatan keterlibatan perempuan masih kurang dari 40%, sedangkan yang menjadi pengurus juga sama belum mencapai 40%. Sehingga terjadi kesenjangan terjadi pada pra kegiatan desa Karanggeger:

- a. Masih sedikitnya partisipasi perempuan dalam kehadiran sosialisasi.
- b. Masih sedikitnya keterlibatan kaum perempuan untuk menjadi pengurus LKM dan KSM.

Permasalahan selanjutnya ada pada kegiatan yaitu pembangunan fisik dimana perempuan harusnya ikut membantu dalam proses pembangunan tapi nyatanya perempuan hanya bertugas menyediakan konsumsi selebihnya pembangunan dilakukan oleh laki-laki, hal ini disebabkan masyarakat masih menganggap bahwa perempuan hanya boleh mengurus pekerjaan rumah tangga saja. Sehingga dalam hal pembangunan fisik perempuan tidak ikut membangun.

Inilah kesenjangan yang ada dimana dalam bentuk perempuan sebagai pelaksana kegiatan masih ada persoalan khususnya dalam persentase perempuan dalam kehadiran dan menjadi pengurus yang belum mencapai 40%, selanjutnya pembangunan fisik yang hanya dikerjakan oleh laki-laki.

Pembangunan desa atau pelaksanaan program yang bersifat pembenahan infrastruktur sering kali didominasi oleh dunia laki-laki. Hal ini terkait pandangan masyarakat bahwa pembangunan infrastruktur berhubungan dengan pekerjaan kasar, buruh bangunan atau kuli bangunan. Masyarakat sering kali salah mengartikan bahwa pembangunan yang hanya pantas dikerjakan laki-laki. Masih kurang pemahamannya masyarakat bahwa dalam pelaksanaan suatu program pembangunan infrastruktur melalui banyak tahapannya, dimulai dari tahap perencanaan kegiatan, tahap penganggaran dana, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Sehingga dalam hal ini bukan hanya laki-laki saja yang bisa terlibat namun pihak perempuan juga bisa terlibat dan memang dibutuhkan keterlibatannya.

Pembangunan yang diberikan pemerintah saat ini bukan hanya pada pembangunan fisik saja tetapi juga didampingi dengan pembangunan pola pikir masyarakat. Tujuan pembangunan pola pikir disini untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tidak selalu bergantung pada pemerintah saja, selain itu pemerintah bisa menjadi wadah sebagai fasilitator karena sesungguhnya yang tahu akan kebutuhan pembangunan itu sebenarnya masyarakat sendiri. Sehingga pada program PLPBK memiliki banyak tujuan, berikut ini indikator capaian kinerjanya:

Tabel 1.2 Indikator Capaian Kerja PLPBK Lanjutan

Lampiran 1

Tabel: Indikator Capaian Kinerja

Tujuan	Indikator dampak (impact)	Satuan	Target			Sumber Informasi
			2013	2014	2015	
Mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penataan lingkungan permukiman yang teratur, aman dan sehat	a. Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap lingkungan permukiman yang teratur, aman dan sehat	% Kelurahan			> 80%	Study/evaluasi
	b. Pemanfaat puas dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan lingkungan perumahan, sarana dan prasarana.	% Pemanfaat			> 80%	Study/evaluasi
	c. Infrastruktur yang dibangun 20% lebih murah dibandingkan dengan yang dibangun tidak melalui pemberdayaan masyarakat	% Kelurahan			80%	Study/evaluasi/MIS
Tujuan Antara	Indikator Hasil (Results)	Satuan	Target			Sumber Informasi
			2013	2014	2015	
Mewujudkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih, sehat melalui peningkatan kualitas pelayanan lingkungan perumahan, sarana dan prasarana	a. Partisipasi warga miskin dan rentan terlibat aktif dalam perencanaan partisipatif dan pengambilan keputusan	% Warga Miskin	40%	40%	40%	MIS
	b. Partisipasi perempuan terlibat aktif dalam perencanaan partisipatif dan pengambilan keputusan	% Perempuan	40%	40%	40%	MIS
Meningkatkan perencanaan penataan permukiman miskin berbasis ruang	a. Tersusunnya RPLP dan RTPLP yang sudah diuji publik di tingkat kelurahan dan disahkan oleh Bupati/Walikota	% Kelurahan	70%	80%	90%	MIS/Consultant
	b. RTPLP fokus pada kawasan miskin prioritas	% RTPLP	70%	80%	90%	MIS/Consultant
	c. Kesepakatan penataan permukiman yang tertuang dalam Aturan Bersama terlaksana	% Kelurahan		70%	80%	MIS/Consultant
	d. Kontribusi Pemerintah Daerah dalam bentuk dana atau program penataan permukiman terealisasi sesuai dengan Perjanjian Kerjasama	% Kelurahan		70%	80%	MIS/Consultant
	e. RTPLP memuat Rencana Ruang Terbuka Hijau minimal 10% dari luas kawasan prioritas	% Kelurahan		70%	80%	MIS/Consultant
Meningkatkan sarana, prasarana dan pelayanan permukiman	a. Sarana dan prasarana permukiman yang terbangun berkualitas baik	% sarana dan prasarana terbangun		80%	90%	MIS/Consultant
	b. Pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana terbangun berjalan dan berkelanjutan	% sarana dan prasarana terbangun		60%	70%	MIS/Consultant
	c. Pembangunan sarana dan prasarana permukiman mampu melayani warga miskin (sebagai pemanfaat langsung)	% pemanfaat warga miskin		60%	60%	MIS/Consultant
	d. Terlaksananya audit di lokasi PLPBK	% Kelurahan		90%	90%	MIS/Consultant

Sumber kantor wilayah KOTAKU Probolinggo 21 juli 2017 (data telah diolah)

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa banyak tujuan yang ingin dicapai PLPBK Lanjutan sendiri, namun ada poin yang bertujuan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat, dan disampung dengan poin yang

menyebutkan partisipasi perempuan terlibat aktif dalam perencanaan partisipatif dan pengambilan keputusan harus mencapai 40%. Hal ini yang memperkuat bahwa harus tercapainya 40% keterlibatan perempuan dalam pembangunan.

Pelaksanaan program PLPBK Lanjutan capaian Kerja untuk Partisipasi Perempuan terlibat akan aktif dalam perencanaan partisipatif dan pengambilan keputusan harus mencapai 40%. Sehingga kesadaran akan pentingnya pembangunan bukan hanya berdasarkan jenis kelamin kepada semua kelompok masyarakat baik laki-laki ataupun perempuan tidak ada perbedaan. Partisipasi perempuan dalam pelaksanaan kebijakan bukan hanya mendukung kebijakan atau sekedar menerima sosialisasi mengenai kebijakan yang telah ditetapkan namun juga keterlibatan perempuan untuk turut menentukan jenis kebijakan apa saja dalam guna membangun kesejahteraan pada tempat tinggalnya.

Penegakan keadilan dalam perbaikan kualitas hidup penduduk terutama perempuan sangat penting, hal ini perlu kita sadari bersama bahwa landasan pada pencapaian indikator-indikator yang terukur sesuai dengan harapan pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs). Salah satu indikator tujuan pembangunan milenium (MDGs) adalah meletakkan perempuan sebagai prioritas dalam proses dan pencapaian hasil-hasil pembangunan (Rozaki, 2012; 199). Dapat kita artikan bahwa setiap usaha penanggulangan lingkungan kumuh yang dilakukan dalam program PLPBK Lanjutan memberikan prioritas pada perempuan untuk mengakses hasil-hasil pembangunan. Atas dasar inilah, PLPBK Lanjutan menempatkan salah satu tujuan khusus yakni meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin, kelompok perempuan serta komunitas masyarakat yang lainnya.

Pemerintah pada tahun 2000 juga mengeluarkan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) di segala bidang pembangunan beserta pedoman pelaksanaannya yang “mengintruksikan kepada semua pejabat, termasuk Gubernur, Bupati, Walikota untuk melaksanakan PUG guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian PUG atas kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kewenangan masing-masing”. Telah disinggung pula

dalam Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2005 dan Pasal 3 Undang-undang No. 12 Tahun 2005 disebutkan pula bahwa “Negara menjamin hak yang sederajat antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak sipil dan politik” (Hubeis 2010). Sehingga hal ini makin memperkuat bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembangunan.

Untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender, salah satu upaya yang dilakukan adalah pemihakan kepada perempuan. Salah satu wujud keberpihakan kepada perempuan dalam pembangunan adalah adanya program PLPBK Lanjutan yang mengharuskan adanya keterlibatan perempuan pada semua tahap termasuk perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

PLPBK Lanjutan sendiri program dari Ditjen Cipta Karya (DJCK) guna menyelesaikan pemukiman kumuh. Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) merupakan program berbasis komunitas / keroyokan untuk menata lingkungan permukiman. Secara umum PLPBK diartikan sebagai suatu proses pembelajaran penataan kawasan lingkungan permukiman kumuh. Proses pembelajaran tersebut dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat untuk menciptakan tatanan kehidupan dan hunian yang tertata selaras, sehat, produktif dan berkelanjutan. Serta sebagai sarana terjalinnya hubungan koordinasi yang harmonis antara Pemerintah Daerah (PEMDA), masyarakat dan kelompok peduli. Sasaran dari program PLPBK ini adalah kelurahan yang memiliki kawasan kumuh di wilayah dengan kondisi masyarakat yang sudah siap dalam pembangunan. Perumusan serta pelaksanaan semua dijalankan hingga akhir 2014 yang nanti bisa menjadi program lanjutan pada tahun 2015 sampai dengan 2016.

Tujuan dari program ini adalah menyiapkan landasan kemandirian pada masyarakat. Kemandirian yang dimaksud berupa institusi masyarakat yang representatif, mengakar dan menguat bagi perkembangan modal sosial (social capital) sehingga ini sangat cocok digunakan oleh masyarakat dimasa mendatang serta menyiapkan kemitraan pada masyarakat dengan pemerintah daerah dan berbagai kelompok peduli setempat.

Kelembagaan yang ada dimasyarakat ini disebut Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), yang dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai luhur kemanusiaan sebagai pondasi modal sosial dikehidupan masyarakat yang mulai memudar. selanjutnya LKM ini mulai menjalin kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah daerah serta kelompok peduli setempat yang nantinya terbentuk menjadi Kelompok Swadaya Masyarakat. Selain ada juga Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) kelompok inilah yang membantu LKM untuk melaksanakan pembangunannya. LKM dan KSM inilah yang menjadi pondasi utama keberhasilan pelaksanaan Program PLPBK Lanjutan.

Program PLPBK hadir di Desa Karanggeger Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo. Sebelumnya Desa Karanggeger sudah mendapatkan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) pada tahun 2010-2014 yang tujuannya peningkatan akses penduduk terhadap lingkungan permukiman yang berkualitas. Target 100-0-100 sebenarnya sudah tertuang pada program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) namun cakupannya masih sangat kecil karena dalam program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) sendiri adanya banyak aspek yang dibangun, ditingkatkan dan dibenahi. Dengan adanya RPJMPN 2015-2019 yang mempunyai target pencapaian 100-0-100 Ditjen Cipta Karya membuat program lanjutan yaitu program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Lanjutan Tahun 2015-2016. Target utamanya adalah pencapai 100-0-100.

Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Lanjutan bertujuan memandirikan masyarakat, sehingga keikutsertaan masyarakat sangatlah penting. Dalam hal ini masyarakat adalah seluruhnya dimana tidak adanya pembeda antara laki-laki dan perempuan..

Setelah pelaksanaan program PLPBK Lanjutan pada kawasan kumuh di Karanggeger berubah wilayah yang dulunya kumuh sekarang menjadi asri dan nyaman dimana kesedian air bersih sudah terpenuhi, pemukiman sudah layak huni semua dan sanitasi yang memadai sehingga kalau hujan tidak akan ada lagi

genangan air. Perubahan desa yang sangat besar karena adanya membangun yang ada dimasyarakat khususnya pada RT17 dan RT 16 RW 6 dimana dari program PLBK mereka membangun wilayahnya menjadi lebih baik. Berikut ini program pembangunan yang dilakukan.

Tabel 1.1 Hasil Pembangunan PLPBK Lanjutan Karanggeger Tahun 2015-2016

No	Jenis Kegiatan Pembangunan
1	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
2	Sarana sanitasi
3	Tandon air bersih
4	Penyulingan air
6	Peningkatan kualitas air baku dan jaringan pipa distributor
7	Pengolahan sampah
8	Penataan Bangunan
9	Paving Jalan
10	Peneragan jalan

Sumber kantor wilayah KOTAKU Probolinggo 21 juli 2017 (data telah diolah)

Pelaksanaan Program PLPBK Lanjutan di Desa Karanggeger telah mendapat apresiasi karena dianggap kawasan yang paling berhasil merubah kawasan kumuh menjadi kawasan layakhuni sehingga Desa Karanggeger terpilih menjadi kawasan yang dijadikan film dokumenter nasional untuk percontohan keberhasilan perubahan kawasan kumuh menjadi kawasan layah huni oleh Ditjen Cipta Karya (DJCK)

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan turut mendukung proses penyelenggaraan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Lanjutan (PLPBK Lanjutan), agar program yang dibawakan untuk masyarakat tidak mengalami hambatan. Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor utama, keberhasilan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Lanjutan (PLPBK Lanjutan) pada Desa Karanggeger sangat tinggi

dibandingkan kawasan-kawasan yang lainnya. Kondisi Desa Karanggeger dengan adanya program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Lanjutan (PLPBK Lanjutan) bertolak belakang dengan kondisi sebelumnya sebelum adanya pembangunan.

Dalam pelaksanaan suatu program, keterlibatan masyarakat sebagai subyek atau aktor pembangunan masih lebih banyak di sektor domestik dibandingkan dalam sektor publik. Dalam hal pelaksanaan seringkali Perempuan, serta kalangan miskin seringkali menjadi penerima informasi pihak kedua karena hal ini disebabkan karena tidak pernah/jarang terlibatnya mereka dalam pengambilan keputusan, perencanaan serta pelaksanaan program yang diselenggarakan untuk pembangunan daerahnya.

Partisipasi pada masyarakat dalam pelaksanaan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Lanjutan (PLPBK Lanjutan) sangat bagus namun, tingginya partisipasi masyarakat dalam hal ini sebenarnya hanya dilihat dari secara umumnya saja. Permasalahan khusus yang sering ditemukan adalah masih partisipasi masyarakat masih didominasi dengan lebih banyaknya keikutsertaan kaum laki-laki dibanding keikutsertaan kaum perempuan dalam pelaksanaan PLPBK Lanjutan.

Desa Karanggeger Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo dalam program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Lanjutan dalam mencapai 100-0-100 tahun 2015-2016 menjadi salah satu kawasan yang berhasil. Indikator keberhasilannya dimana dulunya kawasan kumuh yang tidak layak huni menjadi kawasan layak huni dilengkapi dengan ketersediaan semua prasyarat yang layak dan tercapainya 100% akses air, 0 Permukiman kumuh dan 100% sanitasi. Pembangunan Desa Karanggeger ini merupakan bagian dari pemabangunan Kabupaten Probolinggo.

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang memiliki tujuan menjadikan daerahnya sebagai sentra komoditas pertanian pada tingkat wilayah Jawa-Bali dengan mengembangkan agropolitan di Bagian Barat dan di Bagian Timur serta minapolitandi bagian Utara dan Tengah yang didukung oleh

industri dan ekowisata. Guna menyukseskan semua itu pemerintah Kabupaten Probolinggo berkerja keras untuk mealakukan pembangunan pada daerahnya.

Pembangunan yang dilakukan Kabupaten Probolinggo salah satunya pada wilayah Kecamatan Pajarakan menurut RTRW Kabupaten menyebutkan bahwa sebagai wilayah pengembangan kawasan Agropolitan dan Minapolitan sesuai dengan Kebijakan Kabupaten Probolinggo dan khususnya Kecamatan Pajarakan akan dikembangkan kawasan Minapolitan berbasis perikanan dan hasil laut. Sesuai dengan RTRW Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 tentang Kebijakan Sistem Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Probolinggo yang berbunyi :

Pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan di kawasan pedesaan untuk peningkatan komoditi pertanian unggulan disertai pengelolaan hasil dan peningkatan peran dalam agrowisata. RDTR Kecamatan Pajarakan 2006 sesuai dengan apa yang tertuang di Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Pajarakan banyak memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Pusat pemerintahan wilayah Kecamatan dan Pusat Pelayanan Lokal yang berada di Desa Karanggeger.
2. Pusat pengembangan bagi wilayah sekitarnya dalam lingkup Kabupaten Probolinggo, sekaligus merupakan pusat orientasi kegiatan bagi wilayah belakangnya.
3. Sebagai Counter-Magnet bagi Kota Probolinggo dalam wilayah pembangunan Kabupaten Probolinggo, yang diharapkan mampu menahan arus urbanisasi ke Kota Probolinggo.
4. Sebagai kota industri bagi pengolahan hasil hinterland dan industry lainnya yang menggunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Berdasarkan fungsi tersebut diatas maka sektor yang paling dominan di Kecamatan Pajarakan adalah sektor Pertanian dan perikanan, selain itu Kecamatan Pajarakan juga sebagai penyangga bagi perkembangan Kabupaten Probolinggo. Dapat diidentifikasi bahwa Kecamatan Pajarakan akan terus berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Salah satu upaya Kabupaten Probolinggo guna menyelesaikan persoalan kawasan kumuh dengan membuat Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Probolinggo, dokumen rencana strategis sanitasi yang dibuat khusus sebagai percepatan pembangunan sektor sanitasi Kabupaten Probolinggo berjangka menengah 5 (lima) tahun kedepan (2011-2015). Strategi ini untuk mensinergikan upaya-upaya yang akan dilakukan pemerintah (pusat, provinsi, Kabupaten), sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat maupun kelompok masyarakat sehingga program “Terwujudnya kabupaten Probolinggo sehat dan berwawasan lingkungan melalui sanitasi partisipatif tahun 2018.

Kabupaten Probolinggo sendiri mempunyai beberapa kawasan perkotaan yang telah mempunyai fungsi primer dan sarana-prasarana perkotaan yang memadai sehingga berfungsi sebagai pusat distribusi pelayanan perkotaan.

Kawasan perkotaan yang berada pada wilayah sebelah utara terletak di Jalan Arteri Primer Pantai Utara. (Kecamatan Pajarakan) mempunyai sistem prasarana transportasi yang memadai yaitu terdapat system transportasi darat (jalan), jalur Pantura, Rencana Jalan Tol, kereta api, dan laut yang mempunyai akses eksternal dan internal. Kawasan industri estate di Kecamatan Pajarakan.

Kecamatan Pajarakan mempunyai peran yang penting untuk keberhasilan pembangunan Kabupaten Probolinggo, namun pada Kecamatan Pajarakan masih terdapat ada masalah kemiskinan terutama di Desa Karanggeger tepatnya di RT 17 dan RT 16 RW 6. Desa Karanggeger sendiri merupakan desa yang terpilih menjadi Pusat Pelayanan Lokal (PPL) bagi Kecamatan Pajarakan sehingga sangat ironis bila tempat Pusat Pelayanan Lokal (PPL) masih terdapat persoalan kemiskina. Penanganan yang serius oleh berbagai pihak sangat diperlukan dalam hal ini, terutama pihak pemerintah dan masyarakat atau pihak lain yang mempunyai kepedulian terhadap masalah kemiskinan, masyarakat miskin adalah masyarakat yang jarang tersentuh atau dilibatkan dalam berbagai kegiatan, sehingga akan menambah jarak pemisah dan kesenjangan yang mengakibatkan banyak timbulnya penyakit sosial dan tindakan-tindakan lain diluar norma kehidupan, ketidakberdayaan dan ketidakmampuan warga miskin keluar dari kondisi seperti ini akan semakin parah apabila pola pikir , prilaku dan kepedulian

masyarakat sudah semakin berubah dan menyimpang hal inilah yang membuat sebagian wilayah Desa Karanggeger berkembangnya pemukiman kumuh hal ini masih berkaitan erat dengan garis kemiskinan pada masyarakat.

Penanganan pemukiman kumuh pada desa didukung oleh Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) untuk 5 (lima) tahun dibuat guna menyelesaikan persoalan yang terjadi pada masyarakat, khususnya untuk menyelesaikan pemukiman kumuh yang masih banyak. Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) merupakan rencana rinci tata ruang dengan kedalaman rencana penataan bangunan dan lingkungan kumuh, untuk kurun waktu 5 tahun. RPLP merupakan dokumen rencana tata ruang desa dalam menangani kawasan kumuh yang dilengkapi dengan peta berskala 1: 1.000, arahan pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat, rencana sistem sarana prasarana, rencana investasi.

Pembangunan pada Kecamatan Pajajaran sangat penting adanya hal ini didukung dengan RTRW Kabupaten Probolinggo, RPJMN 2015-2019 yang menargetkan 100% akses air 0% pemukiman kumuh 100% sanitasi, serta adanya Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Probolinggo dan terakhir Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP). Semua kebijakan yang ada saling berkaitan itu menyelesaikan persoalan kawasan kumuh. Sehingga Desa Karanggeger pada Kecamatan Pajajaran mendapat perhatian lebih guna memberantas kawasan kumuh.

Keberhasilan dalam implementasi program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Berkelanjutan mencapai 100-0-100 Tahun 2015-2016 Desa Karanggeger Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo dari sisi pembangunan fisik dinyatakan berhasil ini ditandai dengan prestasi yang didapatkan, Desa Karanggeger terpilih kawasan yang dijadikan film dokumenter untuk perubahan pemukiman kumuh menjadi pemukiman layak huni.

Keberhasilan yang didapatkan Desa Karanggeger dalam Program PLPBK Lanjutan bukan hanya pihak laki-laki yang berperan, akan tetapi keterlibatan perempuan juga sangat diperlukan. Olehnya itu satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah keterlibatan perempuan desa tersebut dalam program ini.

Penelitian yang dilakukan terhadap kaum perempuan desa menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan desa dilaksanakan melalui kegiatan kelompok perempuan desa. Keterlibatan perempuan yang ada memang masih sangat sedikit, namun meskipun keterlibatan perempuan yang tidak mencapai 40%, para perempuan yang ada berperan aktif dalam seluruh kegiatannya dan bertanggung jawab dengan tugas mereka.

Keikutsertaan perempuan masih belum mencapai 40% dibandingkan laki-laki namun mereka memberikan dampak yang cukup besar dalam keberhasilan program PLPBK Lanjutan yang berorientasi pada pembangunan 100% akses air, 0% pemukiman kumuh dan 100% sanitasi. Mengingat pentingnya partisipasi perempuan dalam mencapai keberhasilan program, perempuan pun menjadi faktor penentu dalam keberhasilan kebijakan/program, Dari uraian yang ada penulis merasa tertarik dimana meskipun keterlibatan perempuan tidak mencapai 40% tapi mereka memberikan dampak yang sangat besar dalam pembangunan sehingga ingin mengetahui bagaimana partisipasi perempuan dalam program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Lanjutan mencapai 100-0-100 Tahun 2015-2016 . Berdasarkan uraian di atas peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Partisipasi Perempuan dalam Pelaksanaan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Lanjutan (Studi Desa Karanggeger Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2016)”**.

1.1 Rumusan Masalah

Sebuah penelitian dilakukan karena di dorong oleh rasa keingintahuan dari manusia itu sendiri. Rasa keingintahuan itu muncul karena manusia menemukan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang seharusnya terjadi, adanya penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan yang biasanya hal ini disebut dengan masalah. Seperti yang dinyatakan oleh Guba dalam Moleong (2006:93), bahwa.

“masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang

menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban.”

Adanya permasalahan dan masalah yang muncul sedapat mungkin dapat dipecahkan kemudian masalah harus dirumuskan terlebih dahulu agar jelas, karena dengan perumusan masalah yang jelas akan memudahkan dalam pengumpulan data dan pemecahan masalah. Menurut Sugiyono (2009:35) mengemukakan bahwa, “Rumusan masalah merupakan suatu pernyataan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data”.

Dengan demikian, berdasarkan pengertian tersebut serta dari pemaparan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *Bagaimana Partisipasi Perempuan dalam pelaksanaan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Lanjutan di Desa Karanggeger Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2015-2016?*

1.2 Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu sehingga penelitian tersebut perlu diangkat. Tujuan penelitian merupakan suatu hakekat mengapa penelitian perlu dilakukan dan diperdalam lebih lanjut, yang tentunya selaras dari rumusan permasalahan yang ada. Menurut Prastowo (2012:154), tujuan penelitian adalah “Pernyataan yang dirumuskan secara konkret, tegas dan sederhana tentang hal-hal yang ingin diungkapkan atau dijawab melalui penelitian yang kita laksanakan.

Dengan demikian, berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah *“Mendeskripsikan Partisipasi perempuan dalam pelaksanaan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Lanjutan di Desa Karanggeger Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2015-2016?”*.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan gambaran kegunaan suatu penelitian tersebut baik bagi kepentingan ilmu pengetahuan (akademik), pemerintah, dan kehidupan masyarakat secara luas. Manfaat penelitian didasarkan pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Bagi dunia akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi maupun sumbangsih terhadap pengembangan ilmu administrasi negara, baik yang bersifat teoritis maupun praktis, khususnya terkait konsep perencanaan pembangunan dan perencanaan pembangunan daerah, keterlibatan masyarakat khususnya perempuan sangat penting dalam Pembangunan dan partisipasi perempuan. Keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan diharapkan menjadi langkah kongkrit guna menyukseskan pembangunan pada daerahnya.

b. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah terkait partisipasi perempuan dalam pembangunan, khususnya partisipasi perempuan dalam program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas yang kemudian menjadi masukan pada pemerintah untuk pembangunan yang diharapkan agar sukses serta menggali potensi perempuan untuk mendukung pembangunan.

c. Bagi masyarakat luas

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat, sehingga muncul tanggapan positif yang nantinya dapat menggerakkan masyarakat serta khususnya perempuan secara proaktif dalam setiap pembangunan.

BAB 2. TINJUAN PUSTAKA

Suatu kegiatan penelitian, diperlukan adanya landasan sebagai konsep dasar yang dipakai dalam menemukan langkah – langkah untuk memperoleh kemudahan dan menyederhanakan pemikiran pada setiap aktual penelitian. Definisi landasan teori menurut Sugiono (1997: 305) banyatakan bahwa :

“ Landasan teori adalah teori – teori yang relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti, serta sebagai dasar untuk memberikan jawaban sementara terhadap rumusan – rumusan masalah yang diajukan (hipotesis) , dan dilakukan instrument penelitian”.

Jadi konsep merupakan suatu gejala yang akan diteliti. Sedangkan penelitian ilmiah juga diperlukan adanya suatu pedoman dan pegangan yaitu berupa konsepsi dasar Konsepsi dasar merupakan sesuatu landasan teori yang akan dipakai untuk menemukan langkah – langkah penelitian. Konsep dasar dibutuhkan agar tulisan penulis tidak melenceng dari permasalahan atau konsep yang ada. Dengan demikian tujuan dari konsepsi dasar tersebut adalah untuk menyederhanakan pemikiran kita dan memberi landasan pokok berfikir untuk membahas dan mengkaji masalah yang menjadi inti pokok suatu penelitian. Melalui konsep ini, peneliti diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikiran dunia teori dan dunia observasi, antara abstrasi dan realitas. Untuk itu konsep perlu didefinisikan secara tepat sehingga tidak terjadi kesalahan pengukuran.

Sedangkan penelitian ilmiah memerlukan suatu pedoman yaitu konsep dasar, Konsep dasar dapat menentukan langkah – langkah untuk mendapatkan kemudahan dan penyerdahanaan. Konsep dasar suatu pandangan teoritis – teoritis sebagai dasar pemikiran bagi peneliti guna memecahkan masalah yang diteliti.

Beberapa yang perlu dijelaskan secara teoritis dalam penelitian ini yaitu,

1. Pembangunan
2. Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Lanjutan
3. Gender dan Pembangunan
4. Partisipasi dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan
5. Analisis Gender

2.1 Konsep Pembangunan

Secara umum, pembangunan dapat diartikan merupakan sebuah proses perubahan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Di dalam upaya perubahan tersebut tidak terlepas dari serangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan perubahan yang dilakukan mampu mencapai sasaran maupun tujuan maka harus didukung dengan potensi yang ada, di antaranya sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya modal. Dalam bahasa Inggris, kata pembangunan selaras dengan kata “*development*” yang berasal dari kata kerja “*to do develop*”, yang artinya “menumbuhkan”, “mengembangkan”, “meningkatkan”, atau “mengubah secara bertahap” (*to change gradually*). Dengan demikian, pembangunan dapat diartikan sebagai proses memajukan atau memperbaiki suatu keadaan melalui berbagai tahap secara terencana dan berkesinambungan (Conyers dan Hill dalam Huraerah, 2011:12). Masih dalam buku yang sama, menurut Budiman dalam Huraerah (2011:12), “kata ini diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya.”

Siagian menjelaskan dalam Surjono dan Nugroho (2007:14), “pembangunan merupakan suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation Building*).

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah upaya perubahan yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah secara berkesinambungan dan terencana untuk memajukan masyarakat dan mengubah keadaan masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Pada umumnya, paradigma pembangunan digunakan untuk proses pembangunan pada suatu bangsa itu sendiri, menurut buku Tjokrowinoto yang berjudul “*Pembangunan: Dilema dan Tantangan*” pada halaman 216 terdapat tiga paradigma pembangunan sebagai berikut.

1. Paradigma pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan (*production centered development*)

2. Paradigma pembangunan yang berpusat pada kesejahteraan (*welfare paradigm*)
3. Paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*).

Sedangkan perbedaan di antara ketiga paradigma tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perbandingan Karakteristik Tiga Paradigma Pembangunan

Karakteristik	Paradigma Pembangunan		
	Pertumbuhan	Kesejahteraan	People-Centered
Fokus	Industri	Pelayanan	Manusia
Nilai	Berpusat pada industry	Berorientasi pada manusia	Berpusat pada manusia
Indikator	Ekonomi makro	Indikator Sosial	Hubungan manusia dan sumber
Peranan pemerintah	Enterpreneur	Pemberi layanan	Pembina kemampuan atau fasilitator
Sumber utama	Modal	Kemampuan administratif dan anggaran	Kreatifitas dan komitmen
Kendala	Konsentrasi dan marginalisasi	Keterbatasan anggaran dan inkompetesi aparat	prosedur yang tidak mendukung

Sumber: Tjokrowinoto (1996:216) ,dikutip 22 juni 2017

1. Tjokrowinoto (1996:216) menyebutkan mengenai karakteristik dari paradigma pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan (*production centered development*) sebagai berikut.
 - a. Berorientasi pada peningkatan taraf hidup yang diukur dari kenaikan nilai ekonomi barang dan jasa yang diproduksi serta kenaikan tingkat konsumsi masyarakat
 - b. Konsentrasi pemilikan alat produksi
 - c. Dominasi mekanisme pasar dalam menentukan jenis, kuantitas, kualitas barang dan jasa yang diproduksi
 - d. Optimalisasi pemanfaatan kapital

- e. Sistem perencanaan yang sentralistis.
2. Komitmen dari paradigma pembangunan yang berpusat pada kesejahteraan (*welfare paradigm*) adalah melaksanakan sejumlah besar program yang akan mengantarkan buah pembangunan kepada sebagian anggota masyarakat dalam waktu yang sesingkat mungkin, melalui jalur yang selangsung mungkin, terutama sekali dengan cara meningkatkan akses mereka kepada berbagai pelayanan publik dan penyuluhan. Tjokrowinoto (1996:217) menyebutkan mengenai kelemahan paradigma kesejahteraan sebagai berikut.
 - a. Program-program kesejahteraan yang didesain, dibiayai dan dikelola secara sentralistis ini memerlukan biaya yang amat mahal untuk dapat berhasil, lebih dari apa yang ditanggung oleh birokrasi.
 - b. Program-program kesejahteraan semacam ini terlalu menguntungkan pelaksanaannya pada manajemen birokrasi yang tegar dan tidak lentur yang tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Sebaiknya rakyat harus menyesuaikan diri dengan apa yang akan diberikan oleh birokrasi.

Paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) memberikan peranan kepada individu bukan sebagai subjek akan tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan tujuan yang hendak dicapai, menguasai sumber-sumber, mengarahkan proses yang menentukan hidup mereka (Tjokrowinoto, 1996:218). Paradigma ini memberikan tempat yang penting bagi prakarsa dan beragaman lokal, selain itu paradigma ini menekankan masyarakat lokal yang mandiri (*self reliant communities*) sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri.

Korten dalam Supriatna (2009:209) mengemukakan bahwa dalam pembangunan berorientasi pada pembangunan manusia, dalam hal ini masyarakat yang menerima program pada pelaksanaannya dengan keterlibatan masyarakat secara langsung karena hanya dengan adanya partisipasi dari masyarakat

penerima program maka hasil pembangunan ini akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kesesuaian seperti ini maka hasil pembangunan dapat memberi manfaat secara optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu salah satu indikator keberhasilan suatu pembangunan adalah dengan adanya partisipasi masyarakat penerima program. Selanjutnya Tjokrowinoto dalam Mardikanto dan Soebiato (2013:18) memberikan deskripsi mengenai ciri-ciri pembangunan yang berpusat pada rakyat (manusia) sebagai berikut.

Pertama, prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat sendiri;

Kedua, Fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka;

Ketiga, pendekatan ini mentoleransi variasi lokal dan karenanya, sifatnya fleksibel menyesuaikan dengan kondisi lokal;

Keempat, di dalam melaksanakan pembangunan, pendekatan ini menekankan pada proses *social learning* yang di dalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan diri saling belajar;

Kelima, proses pembentukan jejaring (*networking*) antara birokrasi dan lembaga swadaya masyarakat, satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiri, merupakan bagian integral dari pendekatan ini, baik untuk meningkatkan kemampuan mereka mengidentifikasi dan mengelola berbagai sumber,

maupun untuk menjaga keseimbangan antara struktur vertikal maupun horizontal. Melalui proses *networking* ini diharapkan terjadi simbiose antara struktur-struktur pembangunan di tingkat lokal.

Pembangunan yang berpusat pada rakyat menekankan bahwa manusia adalah sasaran pokok utama dan sumber paling strategis. Karena itu, pembangunan juga meliputi usaha terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensi manusia serta mengarahkan minat mereka untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan tentang berbagai hal yang akan memiliki dampak pada mereka dan mencoba untuk mempromosikan kekuatan manusia itu sendiri.

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa inti dari pembangunan yang berpusat pada rakyat merupakan pemberdayaan yang mengarah kemandirian pada masyarakat. Dalam konteks ini, dimensi partisipasi masyarakat menjadi sangat penting karena melalui partisipasi, kemampuan masyarakat dan perjuangan mereka untuk membangkitkan dan menopang pertumbuhan kolektif menjadi kuat. Tetapi partisipasi di sini bukan hanya berarti keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan atau masyarakat hanya ditempatkan sebagai “obyek”, melainkan harus diikuti keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan dan proses perencanaan pembangunan, atau masyarakat juga ditempatkan sebagai “subyek” utama yang harus menentukan jalannya pembangunan. Oleh karena itu peneliti menggunakan paradigma pembangunan yang berpusat kepada manusia.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam seluruh proses pembangunan. Sedangkan pembangunan yang baik memerlukan perencanaan yang matang agar nantinya pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan perencanaan sendiri merupakan alur maupun rentetan kegiatan guna mencapai tujuan tersebut. Perencanaan pembangunan harus bersifat *top down* dan *bottom up*, artinya perencanaan di tingkat bawah harus berpedoman pada perencanaan di tingkat atasnya dan perencanaan di tingkat bawah sendiri berfungsi sebagai masukan terhadap penetapan perencanaan di tingkat atas. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perencanaan pembangunan

ditingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu desa karena mayoritas masyarakat Indonesia bertempat tinggal di desa, sehingga pembangunan pada tingkat desa menjadi poin penting. Maka dengan membangun desa sama halnya dengan membangun bangsa.

2.2 Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Lanjutan

Permukiman kumuh merupakan suatu persoalan serius yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Hal ini diakibatkan Permukiman kumuh merupakan cerminan dari berbagai masalah pada masyarakat mulai dari kemiskinan, rendahnya tingkat kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, lingkungan yang tidak layak huni serta berbagai masalah sosial yang ada pada masyarakat.

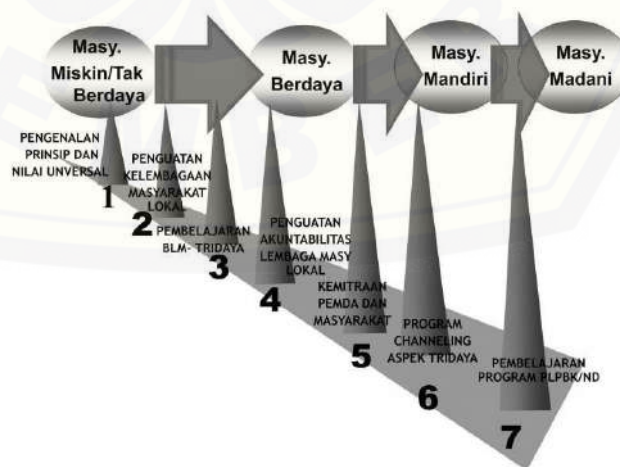
Penyelesaian persoalan permukiman kumuh tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Sehingga saat ini pemerintah harus mampu mensinergikan dengan masyarakat dalam menjalankan program tersebut. Hal ini dimaksudkan pemberantasan permukiman kumuh mempunyai sifat partisipatif. Dikatakan partisipatif karena didalam pelaksanaannya melibatkan seluruh elemen pemerintah, pihak swasta, tokoh masyarakat, tokoh agama setempat dan seluruh masyarakat baik itu laki-laki dan perempuan semua terlibat tanpa terkecuali.

Pemerintah membuat suatu program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis komunitas (PLPBK) guna membrantas permukiman kumuh. Selain itu pelaksanaannya program sepenuhnya melibatkan masyarakat sedangkan pemerintah memiliki peran sebagai pendamping saja. Sehingga dalam hal ini peran aktif masyarakat sangatlah penting.

Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) dan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Lanjutan (PLPBK Lanjutan) merupakan suatu proses pembelajaran penataan kawasan permukiman miskin yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat untuk menciptakan tatanan kehidupan dan hunian yang selaras, sehat, produktif, berjati diri, dan berkelanjutan. Fokus dari program PLPBK ini adalah pada penguatan dan pengembangan modal sosial melalui pengokohan nilai – nilai universal dan

kearifan lokal, penguatan pelayanan masyarakat di bidang ekonomi, lingkungan dan sosial (*community services*). Cara yang dilakukan dengan membuka ruang kreativitas dan inovasi pada masyarakat guna menciptakan sumberdaya pembangunan lingkungan mereka. PLPBK ini merupakan intervensi dari PNPM mandiri perkotaan yang dianggap sudah berhasil dalam menanggulangi kemiskinan sampai pada tingkat Bawah.

Tahapan pertama, PNPM Mandiri Perkotaan berorientasi untuk membangun pondasi “masyarakat berdaya” dengan adanya sejumlah kegiatan intervensi yang berdampak pada perubahan sikap, perilaku, cara pandang masyarakat yang bertumpu terhadap nilai universal yang ada pada masyarakat sendiri. Selanjutnya merupakan tahap orientasi dalam pembangunan transformasi yang menjadikan “masyarakat mandiri” cara yang dilakukan oleh PMPN Mandiri Perkotaan melalui sejumlah intervensi pembelajaran kemitraan dan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli untuk mengakses peluang dan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat itu sendiri. Pada tahap lanjutan, PNPM Mandiri Perkotaan lebih berorientasi untuk membangun transformasi menuju “masyarakat madani” hal ini dilakukan melalui adanya intervensi pembelajaran penataan lingkungan permukiman secara menyeluruh berbasis komunitas (PLPBK) atau *Neighborhood Development*. Berikut skema transformasi sosial PNPM mandiri Perkotaan



Gambar 2.1 Skema Transformasi Sosial PNPM Mandiri Perkotaan (dikutip 22 juli tahun 2017)

Dalam konteks pembelajaran menuju masyarakat mandiri dan madani, maka intervensi nomor lima, enam dan tujuh dapat dilaksanakan baik secara berurutan maupun tidak, sesuai kemampuan dan kebutuhan masing– masing masyarakat.

a. Strategi Pelaksanaan

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka strategi yang akan dilakukan dalam PLPBK adalah;

- 1) Mendorong untuk terjadinya sinergi antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelompok yang peduli melalui perencanaan partisipatif yang berorientasi pada ruang.
- 2) Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat maupun pemerintah daerah agar dapat mengelola proses peningkatan kualitas lingkungan permukiman secara mandiri dan berkelanjutan.
- 3) Mendorong terjadinya perubahan sikap dan perilaku masyarakat melalui proses penataan lingkungan permukiman yang teratur, aman dan sehat.

b. Prinsip – prinsip pelaksanaan PLPBK

- 1) Perencanaan Komprehensif
- 2) Perencanaan Ruang Kawasan
- 3) Keterlibatan Aktif Pemerintah Daerah
- 4) Kreatif
- 5) Inovatif
- 6) Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) dan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Lanjutan (PLPBK Lanjutan) sebenarnya sama saja karena ini program yang sama yang sifatnya adalah program lanjutan, Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) dilaksanakan pada tahun 2013 - 2014 sedangkan

Lanjutnya pada Tahun 2015 – 2016 sehingga seluruh SOP yang digunakan juga sama. Tujuan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Lanjutan (PLPBK Lanjutan) sebagai berikut:

Tujuan PLPBK Lanjutan Tahun 2015-2016:

1. Berjalannya proses pendampingan penyusunan proposal kegiatan dan DED yang selaras dengan perencanaan kota (RKP-KP/SIAP) dan/atau SK Kumuh Bupati/Walikota.
2. Mewujudkan proses pencairan dana BLM PLPBK sesuai target pencairan pada bulan November Tahun 2015-2016; dan
3. Mewujudkan pemanfaatan BLM kegiatan PLPBK sesuai dengan proposal kegiatan dan DED yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis/Pokja Kabupaten?Kota dan Ketentuan-ketentuan lainnya

Selanjutnya adalah Keluaran PLPBK Lanjutan Tahun 2015-2016

1. Terfasilitasinya proses penyusunan proposal dan DED kegiatan PLPBK di lokasi prioritas yang selaras dengan perencanaan kota (RKP-KP) dan/atau SK Kumuh Bupati/Walikota;
2. Terfasilitasinya proses pencairan dana BLM PLBK sesuai dengan target yang telah ditetapkan; dan
3. Terlaksananya kegiatan pemanfaatan BLM PLPBK sesuai dengan proposal kegiatan dan DED yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis/Pokja Kabupaten/Kota dan ketentuan-ketentuan.

Salah satu wilayah yang telah dilaksanakan program PLPBK adalah Desa Karanggeger, Kecamatan Pajarakan, Kota Probolinggo. Desa Karanggeger merupakan bagian Kota Probolinggo yang termasuk kawasan strategis karena didukung adanya jalan arteri primer Surabaya-Probolinggo-Banyuwangi maupun jalan-jalan yang menghubungkan ke wilayah lainnya.

Desa Karanggeger jumlah kependudukannya mencapai 3.336 jiwa yang tercakup dalam 1.175 kepala keluarga. Jumlah penduduk miskin mencapai 388 jiwa dan mata pencarian sebagian besar penduduk adalah buruh, petani, guru dan PNS.

Desa Karanggerger mempunyai sistem pengaliran air secara umum dari arah selatan ke utara bermuara di selatan Madura. Permasalahan saat musim kemarau, air pada sungai besar tidak sampai pada sungai kecil, sehingga system irigasi pertanian dan perkebunan menjadi terganggu, sedangkan pada saat musim hujan rawan akan terjadi genangan air yang disebabkan kondisi topografi desa Karanggerger berada pada ketinggian 0 – 500 meter diatas permukaan air laut, dengan kemiringan kearah Utara bekisar 0-2%.

Bukan itu saja permasalahan lingkungan yang ada bahwa masih banyak sebagian masyarakat yang tidak punya kamar mandi, minimnya fasilitas sanitasi yang ada dan kebiasaan masyarakat yang membuat limbah kotoran ternak pada sembarang tempat sehingga masih banyaknya wilayah kumuh pada Desa Karanggerger.

Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Lanjutan (PLPBK Lanjutan) yang bersifat partisipatif sehingga, banyak hal yang bisa masyarakat lakukan untuk mendukung pemerintah pelaksanaan program antara lain dengan menyumbangkan biaya, tenaga, pikiran dan memberikan makanan atau minuman dalam pelaksanaannya. Dengan melibatkan masyarakat secara penuh dalam menyelesaikan persoalan permukiman kumuh maka diharapkan seluruh persoalan yang ada bisa terselsaikan. Selain itu juga melatih masyarakat mandiri untuk tidak hanya bergantung pada pemerintah saja namun turut serta membantu pemerintah. Dalam hal ini yang diamsudkan seluruh masyarakat harus terlibat baik dari laki-laki maupun perempuan.

Menurut Suplemen Prosedur Operasional Buku (POB) percepatan penanganan kumuh di lokasi PLPBK Lanjutan Tahun 2015 – 2016 Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis komunitas mempunyai lima tahapan dalam prosesnya tahap persiapan, tahap review program investasi, tahap pelaksanaan, Tahap pengendalian dan tahap keberlanjutan. Dari lima tahap yang ada menjadikan program yang berkelanjutan sehingga pada tahap kelima ada tahap berkelanjutan yang isi adalah Rencana Berkelanjutan. Dari tahapan yang ada maka wilayah prioritas yang telah terpilih mendapatkan

program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas bisa menjadi Program yang berkelanjutan. Berikut ini pelaksanaan setiap Tahap program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Lanjutan pada Desa Karanggeger.

2.3. Gender dan Pembangunan

Gender sering kali diartikan perempuan namun, gender sebenarnya bisa kita pahami semua atribut yang diberikan baik secara sosial, peran, kegiatan, dan tanggung jawab yang berhubungan untuk menjadi perempuan dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat. Bisa kita simpulkan juga bahwa gender merupakan suatu konstruksi sosial yang mengacu terhadap perbedaan sifat antara laki-laki dan perempuan yang bukan berdasarkan dalam perbedaan biologis tetapi cenderung pada nilai-nilai sosial budaya yang lebih menentukan peranan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan individu serta dalam bidang masyarakat yang menghasilkan peran gender (Hubies 2010).

Konsep gender juga diartikan sebagai konsep dimana adanya hubungan sosial yang membedakan antara peranan perempuan dan laki-laki yang telah terbentuk oleh norma dan nilai sosial budaya pada masyarakat yang ada. Dari inilah, peran gender merupakan peran laki-laki dan perempuan yang tidak ditentukan oleh perbedaan jenis kelamin. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka peran gender dapat berbeda di antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya sesuai dengan norma dan nilai sosial budaya yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan dapat berubah dari masa ke masa sesuai dengan kemajuan pendidikan teknologi, ekonomi dan sebagainya dan dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut menandakan bahwa peran gender bersifat dinamis. Berkaitan dengan hal tersebut, dikenal tiga peran gender, yakni sebagai berikut (Komariyah, 2008:3).

1. Peran produktif (peran disektor publik) adalah peran yang dilakukan laki-laki maupun perempuan menyangkut pekerjaan yang

- menghasilkan barang atau jasa, baik untuk dikonsumsi maupun untuk diperdagangkan.
2. Peran reproduktif (peran disektor domestik) adalah peran yang dilakukan oleh seseorang untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sumberdaya manusia dan urusan rumah tangga. Seperti mengasuh anak, membersihkan rumah dan berbelanja untuk keperluan sehari-hari.
 3. Peran sosial adalah peran yang dijalankan oleh seseorang, baik laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Perbedaan biologis dan perbedaan peran, fungsi, tanggungjawab, sikap dan perilaku antara perempuan dan laki-laki sebagai hasil konstruksi sosial dan budaya

Bentuk Kesenjangan Gender, Gender pada hakikatnya mencakup laki-laki dan perempuan, namun seringkali gender dimaknai sebagai perempuan saja. Hal ini disebabkan karena saat ini perempuan seringkali terpinggirkan dalam segala aspek kehidupan, sehingga keberpihakan terhadap perempuan diberi penekanan dan perhatian khusus. Penekanan dan perhatian terhadap perempuan dipandang sangat penting melihat kondisi saat ini bahwa antara laki-laki dan perempuan terdapat kesenjangan (*gap*). Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh konstruksi masyarakat yang dibangun secara sosial dan kultural oleh masyarakat dalam waktu yang lama.

Berbagai kesenjangan tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender merupakan suatu kondisi di mana terdapat perlakuan tidak adil terhadap perempuan dalam keseluruhan proses pembangunan nasional. Ketidakadilan tersebut termanifestasi ke dalam berbagai bentuk tindakan yang diskriminatif terhadap perempuan. Perbedaan tersebut pada akhirnya mengakibatkan perempuan tidak memiliki kebebasan untuk memilih dan membuat keputusan baik untuk diri sendiri maupun lingkungannya. Berbagai bentuk ketidakadilan tersebut adalah sebagai berikut (dalam Djohani, 2008:97).

- a. Subordinasi, dapat diartikan penomorduaan terhadap perempuan atau memposisikan perempuan pada kelas dua dan dinilai lebih rendah dari laki-laki.
- b. Marjinalisasi adalah upaya untuk meminggirkan perempuan dari fungsi-fungsi tertentu, terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan kepemimpinan.
- c. Stereotipe adalah pemberian label atau sebutan terhadap perempuan yang memojokkan perempuan (stigma atau stereotipe negatif).
- d. Beban ganda adalah pembebanan tanggung jawab dan kewajiban secara berlebihan.
- e. Kekerasan terhadap perempuan terjadi karena perempuan dianggap lemah sehingga menjadi obyek tindakan kekerasan baik dalam bentuk fisik maupun psikis.

Pembangunan pada saat ini ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan tersebut terkait dengan kesamaan dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh dari proses pembangunan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu alat yang menjadi dasar untuk menentukan kebijakan atau program yang dapat memperkecil atau menghilangkan kesenjangan tersebut. Alat tersebut adalah analisis gender. Analisis gender adalah proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan serta faktor-faktor yang mempengaruhi (Santoso, 2004a:2).

Konsep gender sendiri dalam pembangunan di Indonesia mengalami pergeseran. Pada menangani permasalahan kemiskinan serta keterbelakangan bangsa-bangsa dunia ketiga yang mengakibatkan terjadi keterbelakangan kaum perempuan sehingga *Woman in Development (WID)* menjadi solusinya, WID mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan. Pelaksanaan WID pada masyarakat mendapatkan kritikan. (Fakih, 1996:60) menyebutkan bahwa WID merupakan strategi arus utama *developmentalism*, lebih menghasilkan penginjkan dan penegakan perempuan. Agenda utama program WID adalah

bagaimana melibatkan kaum perempuan dalam kegiatan pembangunan. Asumsi penyebab keterbelakangan perempuan adalah karena mereka tidak berpartisipasi dalam pembangunan.

Selanjutnya *Gender and Development (GAD)* adalah pencapaian kesetaraan dan kesederajatan dan keadilan, dalam suatu tatanan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. GAD adalah bekerja ke arah terwujudnya keadilan berkenaan dengan dampak dari pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan harus memberi hasil yang sama bagi laki-laki maupun perempuan, sekalipun apa yang diperoleh perempuan dari pembangunan tidak selamanya sama dengan apa yang diperoleh oleh laki-laki. Sebagai strategi, potensi GAD untuk memberi manfaat yang adil kepada perempuan sangat besar. GAD sejajar dengan gagasan tentang keadilan pada umumnya dan keadilan gender pada khususnya (Bemmelen, dalam Ihromi, 1995:208).

2.4 Partisipasi Perempuan

2.4.1 Pengertian partisipasi

Partisipasi menurut Mubyarto adalah tindakan mengambil bagian dalam kegiatan, sedangkan partisipasi masyarakat sendiri adalah ketertiban masyarakat dalam proses pembangunan dimana masyarakat ikut terlibat mulai dari tahap penyusunan program, perencanaan, pembangunan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan (Huraerah, 2011:110). Sedangkan Sulaiman mengemukakan bahwa partisipasi sebagai keterlibatan aktif warga masyarakat seraca perorangan, kelompok, atau dalam kesatuan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program serta usaha pelayanan dan pembangunan kesejahteraan social di dalam dan atau di luar lingkungan masyarakat atas dasar rasa kesadaran tanggung jawab sosialnya (Huraerah,2011:110). Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa, partisipasi merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh masyarakat untuk terlibat dan memengaruhi sebuah kebijakan meskipun tidak benar-benar menentukan (Muluk, 2007:63). Sedangkan Tjokrowinoto (1995:48) mengemukakan alasan pembenaran bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu:

- 1) Rakyat merupakan fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut;
- 2) Partisipasi timbulnya rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat;
- 3) Partisipasi menciptakan kegiatan lingkungan umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaanya akan tidak terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan;
- 4) Pembangunan dapat dilakukan lebih baik dengan dimulai dari dimana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki;
- 5) Partisipasi memperluas *zone* (kawasan) penerimaan pembangunan;
- 6) Ia akan memperluas jangkuan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat;
- 7) Partisipasi menopang pembangunan;
- 8) Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia;
- 9) Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk mengelola program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah;
- 10) Terakhir, tapi tidak kalah pentingnya, partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

Bisa ditarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah adanya keikutsertaan ataupun keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan. Dalam konteks pembangunan, baik mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi terhadap pemabangunan itu sendiri. Meskipun tidak benar-benar sangat menentukan kebijakan yang dihasilkan namun partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan karena dengan partisipasi masyarakat diharapkan dalam pembangunan yang sudah dirancang dapat berjalan dengan semana

mestinya yang akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat merubah masyarakat menjadi sejahtera.

2.4.2 Partisipasi dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan

Partisipasi masyarakat merupakan sebuah keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sehingga, perempuan juga merupakan bagian dari masyarakat dalam proses pembangunan. Kehadiran perempuan dalam suatu pembangunan, seharusnya menjadi poin penting dalam implementasi program pembangunan yang berdasarkan responsif pada gender. Pembangunan pemberdayaan perempuan sendiri telah dilaksanakan sejak lama, hasilnya terlihat dengan adanya peningkatan peran dan kedudukan perempuan diberbagai bidang kehidupan pada saat ini. Namun, peningkatan tersebut masih belum memenuhi harapan akan terwujudnya suatu keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan untuk hak dan kesempatan berpartisipasi serta menikmati hasil dari pembangunan.

Keterlibatan perempuan haruslah secara penuh dimana perempuan bagian dari masyarakat yang mampu menyukseskan suatu pembangunan. Para perempuan harus mempunyai akses yang sama dengan laki-laki, begitupun juga dengan pengambilan keputusan dan segala sesuatu tentang pembangunan. Bila adanya suatu diskriminasi terhadap salah satu pihak dapat ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam suatu pembanguana. Setiap proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi seringkali masih didominasi oleh peran dan partisipasi dari kaum laki-laki. Sehingga pembangunan yang dilakukan belum mampu mempertimbangkan manfaat yang adil bagi pihak perempuan. Dalam setiap tahapan pembangunan, perempuan diharapkan berpartisipasi dalam 6 bentuk, yaitu sebagai berikut (Buchori dkk, 2002:3).

1. Sebagai pengusul, perempuan mengajukan usulan kegiatan dan program pembangunan untuk mengatasi persoalan, memenuhi kepentingan dan kebutuhan prioritas mereka.
2. Sebagai pengambil keputusan, perempuan hadir dan mengemukakan ide, usulan atau pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

3. Sebagai pelaksana kegiatan, perempuan dapat ikut berperan sebagai tenaga kerja, anggota Tim Pelaksana Kegiatan atau anggota Unit Pengelola Keuangan, atau sesuai keinginan dan kemampuannya.
4. Sebagai pemantau, perempuan ikut memantau hasil kerja dan secara aktif seperti meminta laporan pertanggungjawaban keuangan program, serta melakukan tindakan tegas jika menemukan kecurangan di lapangan.
5. Sebagai pemelihara, perempuan ikut memelihara hasil pembangunan sarana dan prasarana, atau bisa juga menjadi anggota Tim Pemelihara.
6. Sebagai penerima manfaat, perempuan bisa menjadi penerima modal usaha maupun menikmati hasil pembangunan berupa sarana dan prasarana yang menggunakan sumberdaya pembangunan.

2.5 Analisis Gender

Pelaksanaan gender dan pembangunan dapat dianalisis menggunakan teknik analisis gender. Analisis gender merupakan sebuah proses yang dibangun secara sistematis guna mengidentifikasi serta memahami pembagian kerja/peran antara pihak perempuan dan laki-laki. Selain itu diperlukannya akses dan kontrol terhadap sumberdaya pembangunan, partisipasi dalam pembangunan, serta manfaat yang diperoleh dari pembangunan, pola hubungan yang timpang antara laki-laki dan perempuan, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lain seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.

Dari perspektif gender terdapat empat faktor yang bisa menimbulkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan baik sebagai obyek maupun sebagai subyek pembangunan, yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. bagi para perencana dalam mengembangkan perencanaan pembangunan diharapkan dapat paham terhadap keempat faktor tersebut, dengan selalu mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan akses, partisipasi kontrol dan manfaat (Bappenas dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2007:3).

1. Faktor Akses. Apakah perencanaan pembangunan yang dikembangkan telah mempertimbangkan untuk memberi akses yang adil bagi perempuan dan laki-laki dalam memanfaatkan sumber-sumber daya pembangunan.

Keadilan gender disini adalah memperhitungkan kemungkinan memberlakukan cara yang berbeda bagi perempuan dalam memperoleh akses yang sama dengan laki-laki.

2. Faktor Manfaat. Apakah perencanaan pembangunan yang dikembangkan ditujukan untuk memberi manfaat bagi perempuan dan laki-laki. Mengingat adanya stereotipe terhadap perempuan dan peran gender yang berbeda, maka apa yang dianggap bermanfaat bagi perempuan, belum tentu dianggap bermanfaat bagi laki-laki.
3. Faktor Partisipasi. Apakah keikutsertaan masyarakat, terutama kelompok perempuan atau suara perempuan (dalam hal aspirasi, pengalaman, kebutuhan) dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan.
4. Faktor Kontrol. Apakah perencanaan kebijakan program kegiatan pembangunan memberikan pengawasan yang setara terhadap sumber-sumberdaya pembangunan bagi perempuan dan laki-laki.

4.2.6 Teknik Analisis Gender Longwe

Teknik gender longwe adalah suatu teknik analisis gender yang dikembangkan sebagai metode pemberdayaan perempuan dengan lima kriteria analisis yang meliputi kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol (Widyaningrom, 1998:169). Lima dimensi pemberdayaan ini adalah kategori analisis yang bersifat dinamis satu sama yang lain berhubungan secara sinergis, saling menguatkan dan melengkapi, serta mempunyai hubungan hirarkis. Berikut ini lima kreteriannya:

- a. Dimensi Kesejahteraan, dimana tingkat kesejahteraan material yang diukur dari terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan, penghasilan, perumahan, dan kesehatan yang harus dinikmati oleh perempuan dan laki-laki. Dengan demikian kesenjangan gender ditingkat kesejahteraan ini diukur melalui perbedaan tingkat kesejahteraan perempuan dan laki-laki sebagai kelompok, untuk masing-masing kebutuhan dasarnya.

- b. Dimensi akses, Kesenjangan disini terlihat dari adanya perbedaan akses antara laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya. Lebih rendahnya akses mereka terhadap sumber daya menyebabkan produktivitas perempuan cenderung lebih rendah dari laki-laki. Selain itu dalam banyak komunitas, perempuan di beri tanggung jawab melaksanakan hampir semua pekerjaan domestik sehingga tidak mempunyai waktu untuk mengurus dan meningkatkan kemampuan dirinya. Pembangunan perempuan tidak cukup hanya pada pemerataan akses karena kurangnya akses perempuan bukan saja merupakan isu gender tetapi juga isu akibat deskriminasi gender.
- c. Dimensi kesadaran, Kritis kesenjangan gender ditingkat ini disebabkan adanya anggapan bahwa posisi sosial ekonomi perempuan yang lebih rendah dari laki-laki dan pembagian kerja gender tradisional adalah bagian dari tatanan abadi. Pemberdayaan ditingkat ini berarti menumbuhkan sikap kritis dan penolakan terhadap cara pandang diatas : bahwa subordinasi terhadap perempuan bukanlah pengaturan alamiah, tetapi hasil deskriminatif dari tatanan sosial yang berlaku.
- d. Dimensi Partisipasi, Partisipasi aktif perempuan diartikan bahwa pemerataan partisipasi perempuan dalam proses penetapan keputusan yaitu partisipasi dalam proses perencanaan penentuan kebijakan dan administrasi. Aspek ini sangat penting pada proyek pembangunan. Disini partisipasi berarti keterlibatan atau keikutsertaan aktif sejak dalam penetapan, kebutuhan, formulasi proyek, implementasi dan monitoring serta evaluasi.
- e. Dimensi Kuasa / Kontrol, Kesenjangan gender ditingkat ini terlihat dari adanya hubungan kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Ini bisa terjadi ditingkat rumah tangga, komunitas, dan tingkatan yang lebih luas lagi. Kesetaraan dalam kuasa berarti adanya kuasa yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, satu

tidak mendominasi atau berada dalam posisi dominan atas lainnya, artinya perempuan mempuayai kekuasaan sebagaimana juga laki-laki, untuk mengubah kondisi, posisi, masa depan diri dan komunitasnya.

Teknik gender longwe digunakan sebagai alat analisis yaitu menganalisis proses kemampuan perempuan, bukan hanya dalam arti kesejahteraan materiil saja. Tujuannya adalah untuk memahami lima butir kriteria analisis (kesejahteraan, akses penyadaran, partisipasi aktif dan penguasaan) sehingga dapat menginterpretasikan pembangunan perempuan sebagai suatu proses yang penting dan bagian dari integral dan proses pembangunan serta untuk mencapai pemerataan gender dalam lima butir tersebut. Metode ini dapat digunakan pada setiap dari siklus proyek yaitu dilihat pada bagian yang dirasa sangat penting, melihat kebutuhan dan isu perempuan dalam implementasi proyek, evaluasi dan program pembangunan melihat derajat sentivitas terhadap isu perempuan yaitu dengan menilai negatif, netral atau positif. Negative berarti tujuan proyek tanpa mengaitkan isu perempuan netral berarti isu perempuan sudah dilihat tetapi tidak diangkat dan ditangani, dan intervensi proyek tidak berrakibat lebih buruk pada perempuan dan positif.

Pembangunan perempuan yang terfokus pada upaya menangani isu gender yang merupakan kendala dalam upaya memenuhi kepentingan perempuan dan mencapai pemerataan untuk laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu peneliti atau perencana harus dapat membedakan antara kepentingan dan isu gender. Kriteria pembagunan perempuan merupakan kerangka analisis untuk mengidentifikasi ketimpangan struktural sebagai sebagai akibat masih adanya sistem deskriminasi gender yang bisa merugikan perempuan atau laki-laki. Pembangunan bukan saja peningkatan akses terhadap sumber dan manfaat tetapi bagaimana akses dan manfaat diperoleh. Teknik gender longwe penulis gunakan karena dianggap mampu untuk melihat sejauh mana partisipasi perempuan dalam pelaksanaan program PLPBK Lanjuta di Desa Karanggeger Tahun 2015-2016.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Definisi metode menurut Usman dan Akbar (2003:42) merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sementara itu, Sudjana (1991:52) secara lebih teknis menjelaskan bahwa metode merupakan suatu penekanan strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang dibutuhkan. Berdasarkan ketiga pendapat tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitiannya.

Metode penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah penelitian karena suatu penelitian dapat diakui hasilnya apabila menggunakan metode penelitian yang tepat dan ilmiah. Dengan kata lain, hasil sebuah penelitian akan sangat bergantung dengan penggunaan metode penelitiannya. Jika dianalogikan, objek penelitian yang akan dikaji ibarat buah, metode penelitian adalah sebuah pisau. Jika seorang peneliti ingin memakan daging buah tersebut, maka peneliti harus terlebih dahulu mengupas kulit buah dengan pisau yang telah disediakan. Artinya, seorang peneliti dapat mencapai tujuan penelitian yaitu mendapatkan jawaban atas masalah penelitian jika peneliti mampu menggunakan metode penelitian yang tepat untuk mengupas masalah-masalah yang ada.

Dalam penelitian ini, peneliti merangkum metode penelitian yang akan digunakan sebagai berikut.

1. Jenis penelitian.
2. Tempat dan waktu penelitian.
3. Data dan sumber data.
4. Penentuan informan penelitian.
5. Teknik dan alat perolehan data.
6. Teknik penyajian dan analisis data.
7. Teknik menguji keabsahan data.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian sebagai salah satu metode penelitian berguna untuk memberi pilihan bagi peneliti dalam menentukan sekian prosedur penelitian yang akan dilakukan. Di dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:22), jenis penelitian merupakan penegasan tentang kategori penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggali suatu gejala atau fenomena sosial yang memiliki karakteristik tertentu, untuk disampaikan pada khalayak umum sebagai gambaran tentang kondisi yang terjadi di masyarakat. Peneliti berusaha mengungkapkan keadaan tersebut secara natural, penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Moleong (2004:11) menjelaskan bahwa dalam penelitian eksploratif data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif, dimana menurut Idrus (2009: 24) yang menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif akan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti.

Menurut Norman dan Yvonna (2009:6), kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur (jika memang diukur) dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya. Hal ini berarti dalam penelitian kualitatif lebih menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan subyek yang diteliti, dan dinamika sitasilah yang kemudian membentuk penyelidikan. Menurut Norman dan Yvonna (2009:6).

“para peneliti kualitatif mementingkan sifat penyelidikan yang sarat nilai. Mereka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menyoroti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya. Sebaliknya, penelitian kuantitatif menitikberatkan pengukuran dan analisis hubungan sebab-akibat antara bermacam-macam variabel, bukan prosesnya. Penyelidikan dipandang berada dalam kerangka bebas bilai.”

Metode kualitatif mendasarkan pada filsafat fenomenologis yang lebih mengutamakan penghayatan, sehingga berusaha memahami dan menginterpretasi makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti itu sendiri.

Terkait dengan jenis penelitian, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga secara utuh, penelitian ini disebut penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini dipandang lebih mendukung dalam memberikan arti dan makna yang berguna dalam menyerap permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi perempuan dalam program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Lanjutan. Peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Lanjutan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu dalam sebuah penelitian menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena perbedaan pada tempat dan waktu penelitian akan sangat mempengaruhi hasil penelitian walaupun penelitian tersebut termasuk dalam satu kategori fokus yang sama. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2016:23), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kurun waktu penelitian tersebut dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti memilih Kabupaten Probolinggo sebagai tempat lokasi penelitian. Desa Karanggeger Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo dipilih sebagai lokasi penelitian dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut.

1. Desa Karanggeger adalah Pusat Pelayanan Lokal bagi Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo.
2. Desa Karanggeger sempat menjadi percontohan dalam keberhasilan kawasan kumuh menjadi kawasan layak huni.
3. Masih belum banyak penelitian di Kabupaten Probolinggo yang mengkaji secara mendalam terkait partisipasi perempuan dalam pelaksanaan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Berkelanjutan

Waktu penelitian adalah jangka waktu untuk melakukan penelitian. Waktu penelitian dalam penelitian ini dilakukan secara berkelanjutan yakni dengan melakukan observasi awal pada tanggal 12 Maret 2017. Kemudian peneliti melanjutkan penelitian pada 09 Agustus – 04 September 2017 guna memperoleh

data-data yang lebih mendalam atas masalah partisipasi perempuan dalam program PLPBK Lanjutan di Desa Karanggeger pada Tahun 2015-2016.

3.3 Data dan Sumber Data

Dalam suatu penelitian, data mempunyai peranan penting sebagai suatu kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Suatu penelitian tidak dapat berjalan dan menjawab permasalahan apabila tidak didukung oleh data-data yang lengkap dan jelas. Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:23) mendefinisikan data sebagai suatu kumpulan fakta dan informasi yang dapat berbentuk angka atau deskriptif yang berasal dari sumber data. Sedangkan pengertian sumber data dalam Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:23) adalah uraian tentang asal diperolehnya data penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen atau sumber informasi lainnya. Lofland dan Lofland dalam Moleong (2012:157) kata-kata dan tindakan merupakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini selain juga ada data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kata – kata dan tindakan yang telah diperoleh lewat wawancara dan observasi. Data primer yang digunakan oleh peneliti didapat dari wawancara dan observasi mengenai partisipasi Perempuan Desa Karanggeger dalam pelaksanaan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Lanjutan tahun 2015-2016.

Data sekunder yaitu data yang sudah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh instansi pemerintah, akademisi, dan pihak lain misalnya dalam bentuk laporan program atau kegiatan, laporan penelitian, dan lainnya seperti dokumentasi yang berupa arsip – arsip. Data sekunder diperoleh peneliti lewat studi pustaka dan sumber dari media massa. Data sekunder yang digunakan peneliti berupa; Pedoman Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas; Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman(RPLP); Dokumen Rencana Tindak

Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP); Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan; dan Bahan presentasi hasil kerja pelaksanaan program PLP-BK Lanjutan di Desa Karanggeger. Data tersebut digunakan oleh peneliti untuk melengkapi data primer yang telah dikumpulkan.

3.4 Penentuan Informan Penelitian

Informan menurut Meleong (2011: 132) “adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.” Informan adalah orang-orang tertentu yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang diperlukan oleh peneliti dalam suatu penelitian. Informan merupakan kunci yang yang dijadikan objek penelitian. Pada pendekatan ini peneliti menggunakan teknik *snowball* dengan memanfaatkan jasa informan kunci.

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan dengan menggunakan kriteria yang disampaikan oleh Sugiyono. Peneliti telah menetapkan tujuh informan dan telah mewawancarai tujuh informan yang terpilih, dengan pertimbangan kriteria diatas, dan ketujuh informan ini merupakan aktor-aktor yang terlibat langsung dan mengetahui secara detail terhadap partisipasi perempuan dalam paelaksanaan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Lanjutan pada Desa Karanggeger Tahun 2015-2016.

Tabel 3.1 Penentuan Informan

No	Informan	Keterangan
1	Indah Susilowati	Sekretaris Lembaga Keswadayaan Masyarakat (Informan kunci dianggap paling mengetahui tentang pelaksanaan program PLPBK lanjutan dan keterlibatan perempuan)
2	Fathur	Sebagai Asisten Kota (Informan direkomendasikan oleh Indah Susilowati selaku informan kunci dianggap mengetahui tentang pelaksanaan program PLPBK lanjutan, Desa Karanggeger)
3	Hasdisun	Ketau TIPP (Informan direkomendasikan oleh Indah Susilowati selaku informan kunci dianggap mengetahui tentang

4	Nanik Kurnia Wati	pelaksanaan program PLPBK lanjutan) relawan perempuan (Informan direkomendasikan oleh Indah Susilowati selaku informan kunci dianggap mengetahui tentang pelaksanaan program PLPBK Berkelanjutan)
5	Winarni	relawan perempuan (Informan Informan direkomendasikan oleh Indah Susilowati selaku informan kunci dianggap mengetahui tentang pelaksanaan program PLPBK Berkelanjutan)
6	Herlina	Pengurus Lembaga Keswadayaan Masyarakat (Informan direkomendasikan oleh Indah Susilowati selaku informan kunci dianggap mengetahui tentang pelaksanaan program PLPBK lanjutan dan keterlibatan perempuan)
7	Gufron	Sebagai Kordinator Kota (Informan direkomendasikan oleh Indah Susilowati selaku informan kunci dianggap mengetahui tentang pelaksanaan program PLPBK lanjutan di Desa Karanggeger)
8	Umi Azizah	Kordinator Kelompok Swadaya Masyarakat (Informan direkomendasikan oleh Indah Susilowati selaku informan kunci dianggap mengetahui tentang pelaksanaan program PLPBK Berkelanjutan)
9	Riski alisha	Pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat (Informan direkomendasikan oleh Indah Susilowati selaku informan kunci dianggap mengetahui tentang pelaksanaan program PLPBK Berkelanjutan)
10	Lukman Hakim	Sebagai Konsultan Manajemen Pusat KOTAKU (Informan direkomendasikan oleh Indah Susilowati selaku informan kunci dianggap mengetahui tentang pelaksanaan program PLPBK lanjutan di Desa Karanggeger)

3.5 Teknik Dan Alat Perolehan Data

Teknik dan alat perolehan data sesuai dengan pengertian dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:24) merupakan suatu uraian yang menjelaskan cara serta instrumen atau alat yang akan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Menurut Sugiyono (2011:223), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik dan alat perolehan data yang digunakan oleh setiap peneliti akan berbeda-beda sesuai dengan jenis penelitian, masalah penelitian, serta jenis data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dan alat perolehan data sebagai berikut.

1. Observasi

Menurut Usman dan Akbar (2003:54), observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Faisal (1990) sebagaimana dikutip dalam Sugiyono (2011:226), observasi diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu: observasi partisipatif, observasi terang-terangan dan tersamar, serta observasi yang tak berstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi secara terang-terangan dan tersamar. Pada jenis penelitian ini, peneliti sedari awal berterang terang kepada sumber data terkait maksud dan tujuannya dalam rangka penelitian. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pada suatu saat peneliti juga melakukan observasi yang tersamar untuk menghindari proses penyimpanan data yang dilakukan secara rahasia oleh sumber data. Alat perolehan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan proses observasi ini adalah kamera untuk mendokumentasikan hasil observasi peneliti.

2. Wawancara

Menurut Usman dan Akbar (2003:57), wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Esterberg (2002) yang dikutip dari Sugiyono (2011:233) mengklasifikasikan wawancara ke dalam tiga kategori, yaitu: wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, wawancara tidak

terstruktur. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis wawancara semiterstruktur sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya. Dalam wawancara semiterstruktur, proses tanya jawab antara peneliti dengan informan akan berlangsung lebih bebas namun tetap dalam kerangka yang jelas terkait topik penelitian tersebut. Dalam proses wawancara ini, peneliti akan terlebih dahulu membuat garis besar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Alat perolehan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan proses adalah buku catatan, alat perekam, dan kamera untuk mendokumentasikan hasil wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Usman dan Akbar (2003:73) memaparkan bahwa dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti dalam mendukung proses penelitian ini adalah semua dokumen yang berkaitan data penelitian yaitu data tentang PLPBK lanjutan pada Desa Karanggeger.

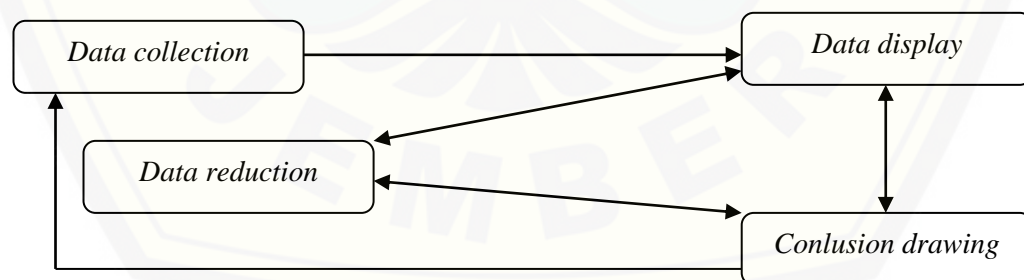
Dokumen merupakan salah satu teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan untuk melengkapi data primer agar dapat memberikan analisis yang lebih akurat. Teknik pengumpulan data dengan mencatat dan memanfaatkan data-data yang ada di instansi yang berkaitan dengan penelitian yang berupa dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini Dokumen yang diperlukan adalah dokumen RPLP/RTPLP Desa Karanggeger, daftar hadir kegiatan PLPBK Lanjutan tahun 2015-2016. Selain itu, dokumentasi berupa foto, catatan, dan hasil rekaman proses observasi dan wawancara dapat juga dijadikan sebagai salah satu dokumen penting yang mendukung penelitian ini. Wawancara dapat juga dijadikan sebagai salah satu dokumen penting yang mendukung penelitian ini

3.6 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Teknik penyajian dan analisis data merupakan metode penelitian terakhir dalam proses penelitian. Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2016:24), teknik penyajian dan analisis data berisi uraian tentang cara

mengkaji dan mengolah data mentah sehingga mampu menjadi sebuah informasi yang jelas terkait cara analisisnya. Menurut Prastowo (2012:237), berbicara tentang teknik penyajian dan analisis data pada penelitian kualitatif artinya berbicara tentang cara mengolah dan melakukan analisis data kualitatif. Sementara itu, Moleong (2012:247) secara lebih taktis menjelaskan bahwa proses analisis data dalam suatu penelitian dimulai dengan melakukan telaah terhadap seluruh data yang telah terkumpul dari berbagai sumber. Setelah menelaah data yang telah terkumpul, peneliti dapat melakukan proses reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu membuat rangkuman atas inti, proses, dan pernyataan yang dianggap penting untuk tetap dilibatkan dalam penelitian. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh seorang peneliti kualitatif dalam menganalisis data adalah menyusun satuan-satuan yang kemudian dikategorikan sekaligus melakukan proses *koding*. Tahap analisis data yang diterakhir ditutup dengan proses pemeriksaan keabsahan data untuk menjaga validitas data yang ada.

Senada dengan pendapat di atas, Miles dan Huberman (2007:16) yang dikutip dari Prastowo (2012:241), membagi proses analisis data kualitatif ke dalam tiga tahapan, yaitu: proses reduksi data, proses penyajian data, dan proses penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga komponen tersebut dapat divisualisasikan ke dalam gambar sebagai berikut.



Sumber: Miles dan Huberman (2007:20) yang dikutip dari Prastowo (2012:243)

Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman

Gambar 3.1 di atas memberikan gambaran terkait proses analisis interaktif menurut Miles dan Huberman Miles dan Huberman (2007:20) yang dikutip dari Prastowo (2012:243), menyangkut *data collection* (pengumpulan data), *data*

reduction (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan atau verifikasi) yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu tahap analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara memilih, menyederhanakan, membuat abstraksi, serta memfokuskan data-data yang telah diperoleh oleh peneliti. Prastowo berpendapat (2012:242) bahwa proses reduksi data akan berlangsung secara terus menerus selama penelitian kualitatif tersebut berlangsung. Dengan kata lain, proses reduksi data berjalan selama pengumpulan data berlangsung bahkan proses ini terjadi setelah penelitian lapangan berakhir dan laporan akhir tersusun dengan lengkap. Proses reduksi data ini dapat dilakukan dengan memilah-milah data dan mencari pola yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Penyajian Data

Proses penyajian data dalam analisis data kualitatif menurut Prastowo (2012:244), terdiri dari sekumpulan informasi yang tersusun untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakannya. Penyajian data yang benar akan mampu membawa pemahaman atas hal-hal yang terjadi dalam penelitian kualitatif ini. Data yang terkumpul dan telah melalui proses reduksi data dapat disajikan dalam bentuk matriks, grafik, bagan, jaringan, dan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam proses analisis data menurut Miles dan Huberman. Setelah semua data yang terkumpul dijaring dengan melakukan proses reduksi data kemudian akan disajikan sebagai bentuk proses penyajian data. Data yang telah disajikan kemudian akan membentuk suatu alur cerita yang dapat menggambarkan isi dari penelitian tersebut. Selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi data. Menurut Sugiyono (2011:253), kesimpulan adalah temuan baru dalam sebuah penelitian. Temuan baru ini berfungsi untuk memberikan gambaran

baru terhadap suatu objek penelitian yang dahulu masih terlihat samar bahkan gelap.

Menurut Prastowo (2012:249) proses reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan atau verifikasi membuat sebuah proses jalinan yang terjadi sebelum, selama, dan sesudah proses pengumpulan data untuk membangun sebuah wawasan secara umum ini dikenal dengan istilah analisis. Melalui model analisis data kualitatif ini, peneliti dalam penelitian ini mencoba menganalisis data yang telah terkumpul untuk mampu menghasilkan sebuah informasi baru yang menjadi jawaban atas penelitian ini.

3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian teknik untuk menguji keabsahan data menjadi sangat penting agar temuan hasil penelitian yang didapat oleh seorang peneliti dapat dipercaya atau diakui validitas dan reliabilitasnya. Hasil penelitian dapat dikatakan valid jika didapatkan dari data-data yang valid juga. Untuk itu dirasa sangat perlu dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik menguji keabsahan data sebagai salah satu metode penelitian.

Dalam melakukan pengujian keabsahan data, peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengujian keabsahan data yang diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Selain digunakan untuk teknik pengumpulan data, triangulasi memiliki fungsi ganda yang sekaligus berguna untuk melakukan proses pengujian keabsahan data yang diperoleh. Triangulasi juga digunakan untuk menghilangkan perbedaan konstruksi yang ada dalam proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menguji keabsahan data dengan melakukan *cross check* data, misalnya peneliti telah mendapatkan data menggunakan teknik wawancara dengan salah satu informan, kemudian data yang diperoleh dari informan akan dilakukan pengecekan ulang dengan data lain misalnya saja dengan menggunakan dokumen, atau wawancara dengan informan lain, dan lain-lain. hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dapat dipercaya. Dalam hal ini peneliti mendapatkan data berupa dokumen RPLP/RTPLP Desa Karanggeger, daftar hadir kegiatan PLPBK Lanjutan tahun 2015-2016, selanjutnya

dari hasil wawancara, hasil foto dan catatan di cek ulang. Sehingga memberikan pandangan pada penulis tentang partisipasi perempuan dalam program PLPBK Lanjutan di Desa Karanggeger Tahun 2015-2016.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian berjudul Partisipasi Perempuan dalam Program PLPBK Lanjutan (sudi Desa Karanggeger Kecamatan Pajarakon Kabupaten Probolinggo) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perempuan sebagai pengurus, perempuan disini sudah berperan aktif hal ini dibuktikan dengan 2 usulan dari pihak perempuan dan usulan itu diterima menjadi kegiatan pembangunan. usulannya pembangunan RTLH untuk rumah salah satu warga, dan adanya usulan pembangunan paving. Hal ini dipengaruhi adanya salah satu pengurus perempuan yang jenjang pendidikannya lebih tinggi dibanding pihak laki-laki, sehingga secara tidak langsung pihak perempuan ada yang memberikan pandangan untuk mengarahkan mereka untuk pembangunan yang lebih baik.
2. Perempuan sebagai pengambil keputusan, disini dalam pelaksanaan program PLPBK Lanjutan perempuan tentunya tidak diberikan batasan mendapat batasan, sehingga mereka yang hadir dalam setiap kegiatan juga sebagai penentu dalam pengambilan keputusan.
3. Perempuan sebagai pelaksana kegiatan, Dalam pelaksanaan kegiatan terbagi menjadi tiga prakegiatan, kegiatan dan paskakegiatan. Yang menjadi kesenjangan disini pada saat kegiatan dimana perempuan hanya menjadi penyedia konsumsi saja, sebenarnya untuk membantu yang lain bisa, hal ini disebabkan masih adanya pola pikir masyarakat yang menganggap perempuan tidak layak untuk ikut membangun. Sedangkan pada saat selesai pembangunan para perempuan turut membantu mengerjakan LPJ.
4. Perempuan sebagai Pemantau, dimana perempuan pada saat kegiatan pembangunan mereka tidak bisa membantu, sehingga para perempuan Desa Karanggeger membantunya dengan menjadi pemantau. Mereka memantau

langsung dalam pembangunan, sehingga para perempuan punya andil besar dalam keberhasilan pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya

5. Perempuan sebagai pemelihara, dalam hal ini pihak perempuan menjelaskan bahwa perempuan Desa Karanggeger sangat berperanaktif dalam pemeliharannya karena fasilitas yang telah dibangun memudahkan mereka dalam mengerjakan tugas rumah tangga mereka.
6. Perempuan sebagai Penerima manfaat, ini berkaitan dengan sebelumnya dimana meskipun ada kalangan perempuan yang tidak terlibat tetapi program PLPBK Lanjutan yang dilaksanakan oleh masyarakat, perempuan pun mendapatkan manfaat yang banyak. Namun inti dari pembangunan memberikan manfaat pada seluruh masyarakat bukan hanya pada perempuan saja.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas maka dari peneliti menyarankan bahwa:

1. Bagi pemerintah, lebih mensosialisasikan mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan. Sosialisasi ini diharapkan dapat mendorong perempuan untuk lebih memiliki kesadaran kritis dalam ikut berpartisipasi untuk pembangunan daerahnya sendiri.
2. Bagi kaum perempuan, lebih memberdayakan diri dengan cara meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan. Partisipasi perempuan seperti ini dapat meningkatkan kapabilitas perempuan sebagai subjek pembangunan, sehingga tidak menjadikan perempuan hanya sebagai penerima pasif pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, satyawati, 2007. *Pemberdayaan Perempuan*. Jurnal Edisi IV/ayasha's/14 Mei 2007. Diunduh Tanggal 23 Juni 2017. Sumber Website Kalyanamitra, Ayasha's weblog.
- Anonim, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Perum Balai Pustaka. Jakarta.
- Benjamin, White. 1998. *Optimisme Makro, Pesimisme, Mikro Penafsiran Kemiskinan Dan Ketimpangan Di Indonesia*. PT. Gramedia Widia Sarana. Jakarta.
- Black, James & AD.J Champion. 1999. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: Replika Aditama.
- Creswell, D. 1984. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Dewanta, Setyawan. 2000. *Kemiskinan Dan Kesenjangan Di Indonesia*. Aditya Media. Yogyakarta.
- Fakih, Mansour, 1996. *Analisis Gender & Transpotasi Sosial*. Yogyakarta (ID) Purtaaka Pelajar
- Fakih, Mansour, 2012. *Analisis Gender & Transpotasi Sosial*. Yogyakarta (ID) Purtaaka Pelajar
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2002. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM Press.
- Hubies AVS.2010. *Pemberdayaan Perempuan dari Masa Kemasa*. Bogor (ID) IPB Pres
- Huraerah, A. 2011. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora
- Kantz, Sani. 1999. *Kepemimpinan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Kartasasmita, G, 1996. *Administrasi Pembangunan Perkembangan Pemikiran Dan Prakteknya Di Indonesia*. P
- Koentjaraningrat.2009.*Pengantar Ilmu Antropologi, Edisi Revisi 2009*.Rineka Cipta, Jakarta.

- Kountour, Ronny. 2003. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta : PPM.
- Mardiyanta, Antun. 2011. *Kebijakan Publik Deliberatif: Relevansi dan Tantangan Implementasinya*. Jurnal Volume 24 Nomor 3. Surabaya: Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Airlangga.
- Moleong, L.J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto, 1985. *Peluang Kerja Dan Peluang Berusaha Di Pedesaan*. BPF. UGM. Yogyakarta.
- Muluk, Khairul. 2007. *Menggugat Partisipasi Public dalam Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing
- Ndraha, Talizuduhu. 1992. *Dimensi-Dimensi Pemerintah Desa*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Santoso, B. 2004a. *Analisis Gender. Jember: Universitas Jember*
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali: Jakarta
- Soepomo, 1992. *Pembangunan Masyarakat*. CV. Karyako. Jakarta.
- Soleh, Chabib. 2014. *Dialektika Pembangunan dan pemberdayaan*. Bandung:Fokusmedia.
- Soepomo, 1992. *Pembangunan Masyarakat*. CV. Karyako. Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sudjana, N & Kusumah, A. 2002. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Suryabrata, Sumadi. 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tjokroamidjojo, 1992. *Perencanaan Pembangunan*. Gunung Agung. Jakarta.
- Tjokowinoto, M. 1996. *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*.
- Usman, H. & Akbar, P. S. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Usman, Sunyoto. 1998. *Pembangunan Dan Pemberdayaan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Zulkarnain Nasution. 2009. *Solidaritas Dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi Suatu Tinjauan Sosiologis*. Malang: UMM Press

Zilfina, Adriani. 2007. *Analisis Program Pemberdayaan Perempuan Berbasis Gender*. Pusat Penelitian Gender (PPG) Universitas Jambi.

Produk Hukum

Inpres Nomer 9 Tahun 2000

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004

RTRW Kabupaten Kabupaten Probolinggo

RDTR Pajarakan 2006

SKK Kabupaten Probolinggo 2011-2015

Internet

<http://kotaku.pu.go.id/> (diakses 4 Maret 2017 pukul 13.06 WIB)

Penelitian Terdahulu

Buchori, C. Dkk. 2002. *Meningkatkan Partisipasi Aktif Perempuan: Belajar dari Pengalaman*. Jakarta: PT Duta Esa Astuti dan World Bank Office.

Aprilia, Sandy. 2015, *Partisipasi Pemuda Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang Desa) Di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Lumajang Tahun 2015*. Tidak diterbitkan. Skripsi, Jember Program Sarjana Universitas jember

- Hadi, Lutfi. 2015, *Analisis Gender Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Tahun 2015*. Tidak diterbitkan. Skripsi, Jember Program Sarjana Univeritas jember
- Zulhaeni, 2010. *Partisipasi Perempuan dalam Forum Warga: Studi tentang Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Melalui Forum Komunikasi RT, RW Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat*.



Dokumentasi wawancara



/

Pedoman wawancara

1. Bagaimana tahapan-tahapan PLPBK Lanjutan yang dilakukan di Desa Karanggeger?
2. Siapa saja yang hadir dalam kegiatan?
3. Bagaimana bentuk partisipasi perempuan dalam pelaksanaan program PLPBK?
4. Siapa saja yang memberikan usulan?
5. Apakah ada batasan antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaannya?
6. Perempuan bertugas sebagai apa dalam pelaksanaannya?
7. Apakah perempuan ikut memantau jalannya pembangunan?
8. Apakah perempuan turut memelihara setelah pembangunan?
9. Bagaimana manfaat pembangunan bagi perempuan?

Dokumentasi Kegiatan Program PLPBK Lanjutan Tahun 2015-2016









SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY/RESEARCH

Nomor : 072/RSY /426.204/2017

- Membaca** : Surat dari : **LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS JEMBER** Tertanggal , 09 Agustus 2017 Nomor : 1507/UN25.3.1/LI/2017 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 18 Tahun 2002 Tentang sistim Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
2. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 25 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Probolinggo,
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN** dilakukan Survey/Research oleh ;

- Nama Peneliti / Penanggung Jawab : **IIN ISNAINI SULISTIYASMOKO**
NIDN/NIP. : 110910201043
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa
Alamat : Jl.Hn. Saonah Klakah RT 31/RW 14 Desa Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang.
Thema/Acara Survey/Resarch : Partisipasi Perempuan dalam Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbaris Kumonitas Berkelanjutan (Studi Desa Karanggeger Kec. Pajajaran.
Daerah / tempat dilakukan Survey / Research : Kec. Pajajaran, Desa Karanggeger, Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kab. Probolinggo.
Lamanya Survey / Research : 09 Agustus s/d 09 Nopember 2017. Ijin berlaku 3 (Tiga) bulan Sejak surat dikeluarkan.
Pengikut peserta Survey / Research : -

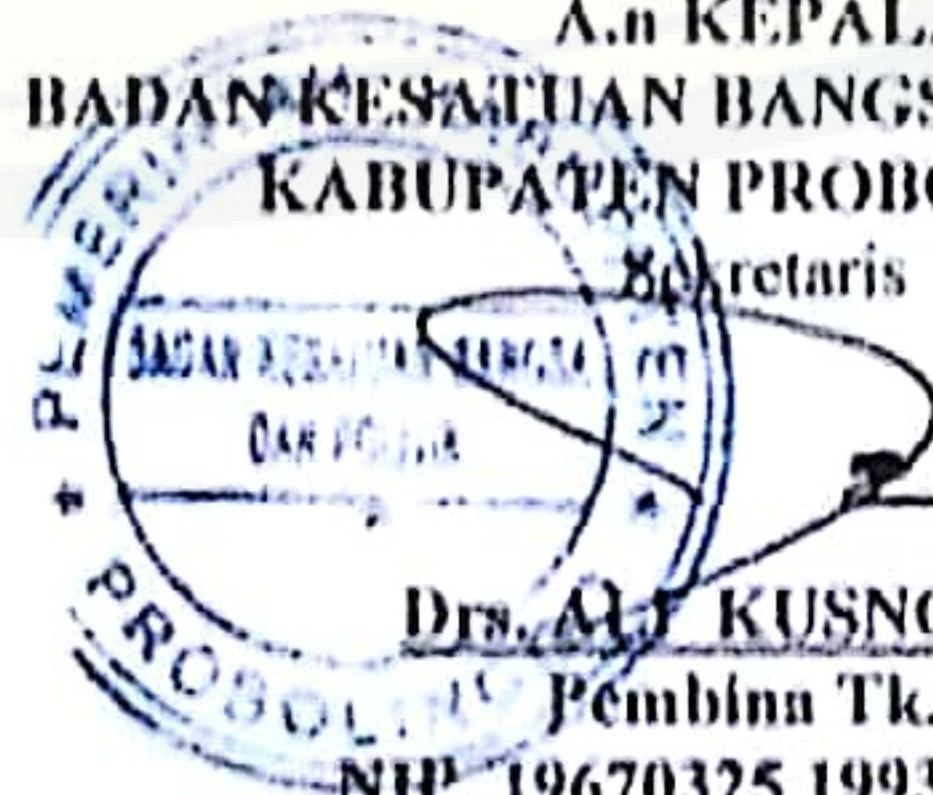
Dengan *ketentuan sebagai berikut*

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan, melaporkan kedatangannya kepada Pejabat setempat.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan, serta menghindari pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan maupun / menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan survey / research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research sebelum meninggalkan daerah survey / research.
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan survey / research diwajibkan memberikan laporannya secara tertulis tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada Bupati Probolinggo Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Probolinggo, 18 Agustus 2017

A.n KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PROBOLINGGO

Sekretaris



Drs. A. J. KUSNO, MSi

Pembina Tk. I

NIP. 19670325 199303 1 007

TEMBUSAN:

1. Ibu Bupati Probolinggo (sebagai laporan)
2. Sdr. Komandan Kodim 0820 Prob;
3. Sdr. Kapolres Probolinggo;
4. Sdr. Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kab. Probolinggo;
5. Sdr. Muspika Kec. Pajajaran dan Desa Karanggeger;
6. Sdr. Sekretaris II UNIV. Jember
7. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN PAJARAKAN
DESA KARANGGEGER

Jl. Raya Karanggeger No.07 Kode Pos 67281

Karanggeger, 21 Agustus 2017

Kepada

Yth. Ketua LKM Barokah

Nomor : 57 /416.7/2017

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : Surat Pengantar Melakukan Survey/ di-
Research KARANGGEGER

Menindak lanjuti Surat dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jember, bahwa yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Karanggeger Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo, dengan ini menerangkan :

- a. Nama : IIN ISNAINI SULISTIYASMOKO
- b. NIDN/NIP : 110910201043
- c. Jenis Kelamin : Perempuan
- d. Agama : Islam
- e. Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Jember
- f. Alamat : Jln. Saonah klakah, RT.31 RW.14 Desa Klakah
Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang

Bahwa orang tersebut diatas akan melakukan Survey Partisipasi Perempuan dalam Program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbaris Kumonitas Berkelanjutan (Studi Desa Karanggeger Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo.

Demikian Surat Pengantar ini kami buat, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

No Reg. 739/416.07/VIII/2017

PENGESAHAN

Telah diperiksa kebenarannya
dan sesuai dengan aslinya

Karanggeger, 21 Agustus 2017





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto Telp (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586
Jember 68121 Email: fisip@unj.ac.id

Nomor : 3059/UN25.1.2/LT/2017
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

7 Agustus 2017

Yth. Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Jember
Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang akan menyelesaikan studinya, diwajibkan untuk menyelesaikan Skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara memperkenankan mahasiswa kami :

Nama : Iin Isnaini Sulistiyasmoko
NIM : 110910201043
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Untuk melaksanakan penelitian di :

1. Desa Karanggeger Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo
2. Kantor Kotaku Probolinggo
3. Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo

dengan lama penelitian 2 (dua) bulan. Adapun tujuan penelitian untuk mendapatkan data penyelesaian skripsi dengan judul "Partisipasi Perempuan Dalam Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Berkelanjutan".

Atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.



Dekan,
Dekan I

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
NIP 19610608 198802 1 001

KABUPATEN
LANDU LANGAN

KABUPATEN
LANDU LANGAN

Paparan
Perhitungan

NO	NAMA	UMUR	LANDU LANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			10
10			11
11			12
12			13
13			14
14			15
15			16
16			17
17			18
18			19
19			20
20			21
21			22
22			23
23			24
24			25
25			26
26			27
27			28
28			29
29			30
30			31
31			32
32			33
33			34
34			35
35			

30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Rapat : TIPP

Hari/Tgl : Rabu, 30 September 2015

Tempat : Kantor UEM barokah

Pembukaan oleh bapak Mudi Hachiono dengan pembacaan Bismillah, dilanjutkan dengan membacakan susunan acara :

1. Sambutan dari ketua UEM
2. Sambutan dari faskel
3. Sambutan dari Askod
4. Tanya - jawab
5. Penutup doa

1. Sambutan dari ketua UEM bapak Sigono.

Langkah kedepan TIPP untuk persiapan pelaksanaan program PLPBK

(Perencanaan Lingkungan Permukiman berbasis komunitas)

supaya berjalan lancar sesuai yang kita harapkan. persiapan dan perencanaan harus di matangkan.

2. Sambutan dari bapak Sunargi selaku faskel lingkungan (fisik

Program PLPBK ini. kegiatannya fokus pada pembangunan fisik saja, bedanya dengan program PNM, kalau PNM kegiatannya, fisik, sosial, ekonomi.

Pelaksanaan kegiatan langkah awalnya :

- Pengajuan usulan dari warga di lingkungan PLPBK
- menyiapkan KSM (kelompok swadaya masyarakat) mulai dari ketua, sekretaris bendahara dan anggota, untuk dilatih dalam pembuatan proposal dan UPJ, dan pekerjaan fisiknya.
- Setiap item-item kegiatan KSM wajib melaporkan hasil kegiatannya dari awal / 0%, pertengahan / 50% dan akhir / 100% kepada TIPP dan UEM, dengan bukti fisik berupa foto kegiatan dan Administrasi.

3. Sambutan dari Askod bapak Fathur.

Pertemuan pada malam ini, bapak? dan ibu? bisa ngobrol-ngobrol, sering, menenma masukan dan mengusulkan, mengajukan usulan apa yang akan dibangun di kawasan PLPBK.

kita tampung usulan dari masyarakat, kemudian kita masukkan dalam Program PLPBK, setelah di sepelekan baru kita laksanakan pembangunannya. Kesepakatan yang akan di atur dalam bentuk Aturan Bersama (AB) diantaranya adalah kesepakatan tentang aturan pembangunan, dalam program PLPBK.

Kesepakatan Aturan Bersama diantaranya :

1. Kesepakatan dari sisi tata ruang
2. Kesepakatan dari sisi Perumahan bangunan
3. Kesepakatan dari sisi Sarana dan Prasarana
4. Kesepakatan dari sisi ekonomi
5. Kesepakatan dari sisi Pelayanan publik
6. Kesepakatan dari sisi kelembagaan.

4. Tanya - Jawab.

1. usulan ibu nanik : usul RTLH (Rumah Tidak layak huni) milik b. murinten yang berada di lokasi RT.17 RW.06, karena keadaannya sangat parah. Keadaan rumah saat itu Dinding Bambu, Lantai tanah, atap genteng, jumlah ruang 2 buah, (ruang tamu dan Dapur)

Jawaban dari P. Andrew : usulan dari ibu nanik akan kami tampung, kami dari tim faskel akan melihat / surve ke lokasi apakah RTLH yang diusulkan masuk kriteria apa tidak.

2. usulan dari ibu winarni : mengusulkan jalan paving yang berada di RT.16 dan 17 karena jalannya rusak, apabila musim hujan jalannya becek sehingga bisa menghambat aktifitas warga di Sekitar terutama warga dari RT.16 dan RT.17.

Jawaban. P. Sunargi : usulan dari b. winarni akan kami pertimbangkan - kami harus mengetahui dulu berapa volume yang akan digarab nanti kami sesuaikan dengan dana yang ada di DED (Detail Engineering Design) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya)

3. usulan dari bpk. Supandi : mengusulkan di bangun Rumah Sampah, karena sampah sangat mengganggu kebersihan lingkungan.

Jawaban P. Sunargi : kalau mengusulkan Rumah Sampah, ada lokasi yang siap untuk dibangun, baru tim faskel dan PLPBK bisa merealisasi pembangunan itu.

5. Penutup do'a oleh bapak hadisun dengan bacaan alhamdulillah karena acara berjalan lancar dan mendapat hasil yang baik.

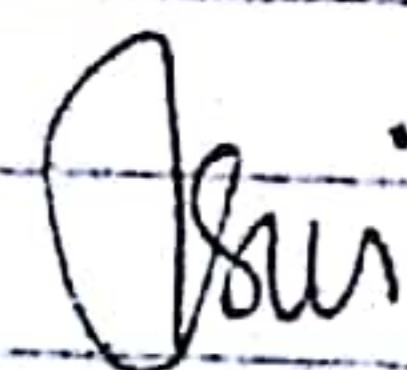
Mengetahui
Ketua LKM



Sijono

Karanggeger, 30 september 2014

Notulen



Indah Susilawati

Date

No	Nama	Alamat	TTD
1	H. Muzamil	TLOGO	[Signature]
2	SUKI	[Signature]	[Signature]
3	M. Wahmanudin	NOKO	[Signature]
4	M. NAFIT	NOKO	[Signature]
5	HOSAN	NOKO	[Signature]
6	GAPII	NOKO	[Signature]
7	ASMARI	NOKO	[Signature]
8	MISWAR	NOKO	[Signature]
9	BUSAR	NOKO	[Signature]
10	HODRI P.	NOKO	[Signature]
11	Sodikin	NOKO	[Signature]
12	Sudono	RT. 01.16	[Signature]
13	Fathorrazi	NOKO	[Signature]
14	Suwaji	RT. 16	[Signature]
15	M. H. ALI	RT 11 / RW 6	[Signature]
16	Suryono	RT 16	[Signature]
17	M. S. Waji	RT 17	[Signature]
18	Supriyadi	RT 17	[Signature]
19	Pirah	RT 17	[Signature]
20	Syagino	TLO	[Signature]
21	M. HASIM	TLOGO	[Signature]
22	LUKMAN H.	NOKO	[Signature]
23	M. A. S. S. S.	-11-	[Signature]
24	D. H. S. S.	-11-	[Signature]
25	K. H. S. S.	RT. 09	[Signature]
26	A. H. S. S.	RT 05	[Signature]
27	H. H. S. S.	RT 03	[Signature]
28	A. H. S. S.	RT 02	[Signature]
29	K. H. S. S.	RT 12	[Signature]
30	I. H. S. S.	RT. 01 / RW. 01	[Signature]
31	HERLINA	"	[Signature]
32	ABDUL WATAB	"	[Signature]
33	IDA HAYATI	RT. 01 RW. 01	[Signature]
34	S. H. S. S.	RT. 10 RW. 4	[Signature]
35	N. H. S. S.	RT. 16 RW 06	[Signature]
36	Winarni	RT. 10. RW. 01	[Signature]

Rapat Sosialisasi PUPK lanjutan
Hari/Tgl Jumat / 30 Oktober 2018
Tempat : Di Dusun Nokollogo

Pembukaan oleh bapak Hadisan selaku anggota um, dengan pembacauan al-falahe dengan harapan acara pada rapat malam ini bisa berjalan lancar tanpa kendala apapun

Susunan acara :

- Sambutan dari bapak Yunus selaku SF kee Pajarakau
 - Pembentukan Pokja - Pokja
 - Tanya - jawab
- ⇒ Sambutan dari bapak Yunus selaku senior Faskel Kecamatan Pajarakau
Assalamu'alaikum wa w.b.
- PUPK : Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas, sering juga disebut Neighborhood Development (ND) atau Noto Desa menata Desa. dalam program PUPK ini pemerintah mengharapkan, akan terwujudnya masyarakat yang aktif dan mandiri, bisa menata lingkungannya sesuai hasil musyawarah yang disepakati bersama, adapun langkah yg harus kita jalani
- Pemilihan pimpinan kolektif (Pintol) dan RT minimal 3 peserta. (Tingkat basis)
- ⇒ Pembentukan Pokja - Pokja
- Pokja Pemilihan : Pemilihan tingkat basis RT.
 - Pokja anggaran Dasar : menggodok anggaran Dasar LKM
 - Pokja Pemantau : memantau keadaan di lingkungan
- * Pokja Pemilihan yang terpilih :
1. Supagiono RT. 16 RW. 06
 2. H. Muzammil RT. 17 RW. 06
 3. Nanik Perwati RT. 16 RW. 06
 4. Umi Kalsum RT. 16 RW. 06
 5. Herlina RT. 2 RW. 01
 6. Holipa RT. 2 RW. 01
- * Pokja Anggaran Dasar yang terpilih :
1. Mudji Hadiono RT. 12 RW. 5
 2. Sawaji RT. 16 RW. 6
 3. Indah Susilowati RT. 01 RW. 1
 4. Khoirul ani RT. 12 RW. 5

* Pokja Pemantau yang di pilih :

1. MUKSIN RT. 2 RW. 1
2. Hosen RT. 16 RW. 6
3. SUPAGIONO RT. 17 RW. 6
4. Agus setyaningsih RT. 2 RW. 1
5. Buani RT. 15 RW. 5
6. Jami'atus soladiyah RT. 7 RW. 3

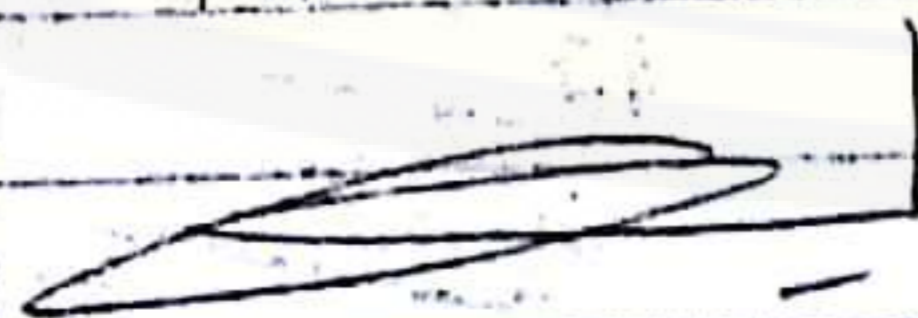
=> Tanya - jawab .

1. - Supagiono : Bagaimana cara pemilihan tingkat basis RT.
 - P. Yunus sf : Bapak dan ibu mendata tiap RT, untuk kandidat yang akan dicalonkan dan setiap RT minimal ada 3 orang . untuk menjadi TIPP (Tim Inti Perencana Partisipatif)
2. - Khoirul ani : Bagaimana tentang Pembiayaan , untuk Pelaksanaan Pimkol .
 - P. Saiful Faskel : Untuk pembiayaan pimkol bisa diambilkan dari BOP LKM , nanti setelah terbentuk TIPP ada BOP tersendiri untuk PLPBK .
3. - Agus setyaningsih : Apa tugas yang harus kami laksanakan sebagai pokja - Pemantau .
 - P. Sunargi Faskel : Dalam Pelaksanaan Pimkol , pokja Pemantau bertugas mengawasi jalannya Pemilihan , antisipasi apabila ada kecurangan dalam pelaksanaan Pimkol , supaya berjalan lancar sampai terpilih TIPP atas pilihan masyarakat itu sendiri .

=> Pembacaan doa dan Penutup oleh bapak Iemail .

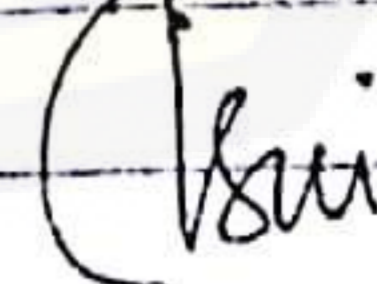
Karanggeger, 9 september 2014

Mengetahui
Ketua LKM





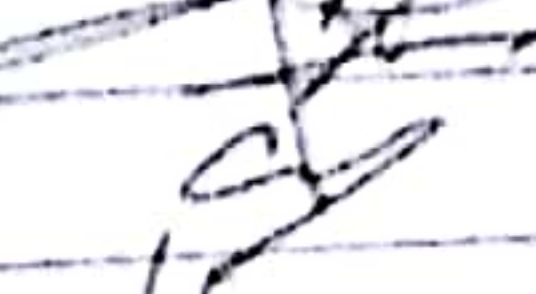
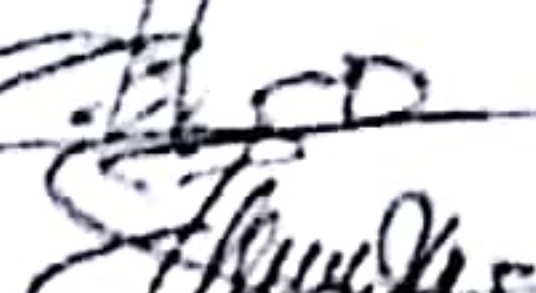

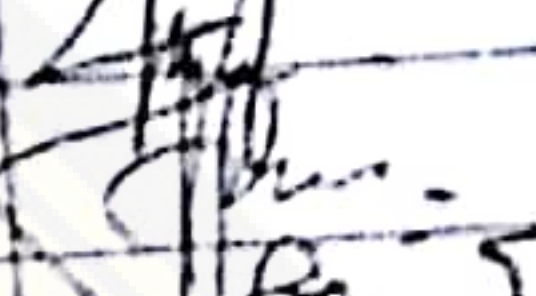
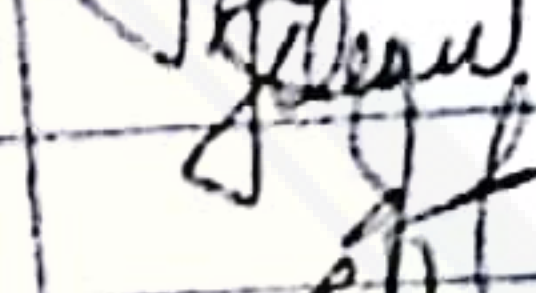

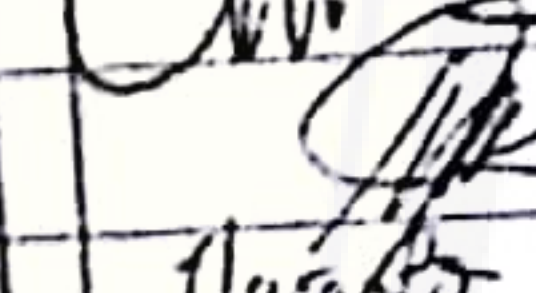
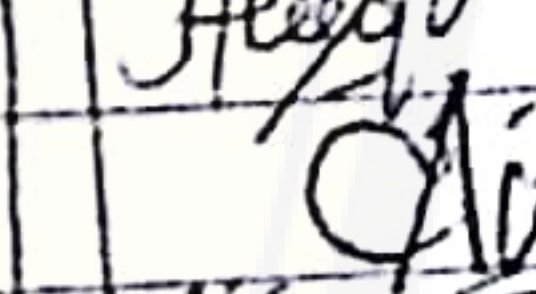
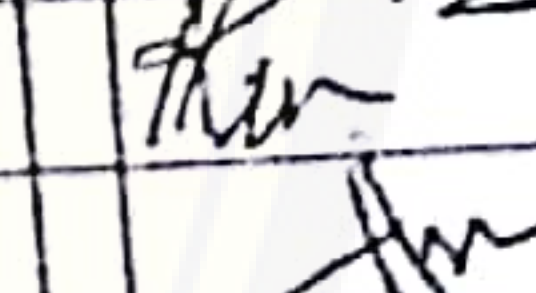
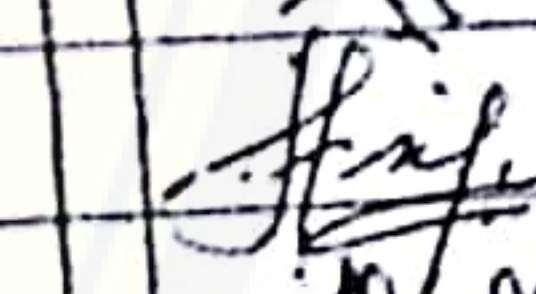
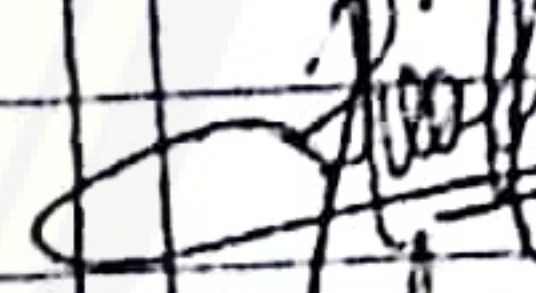

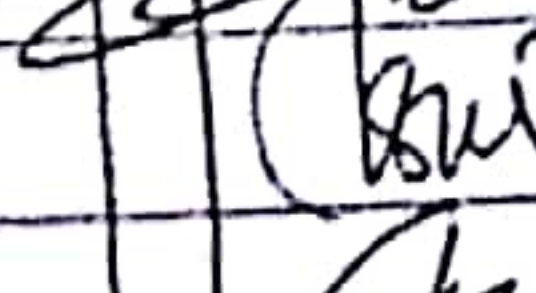
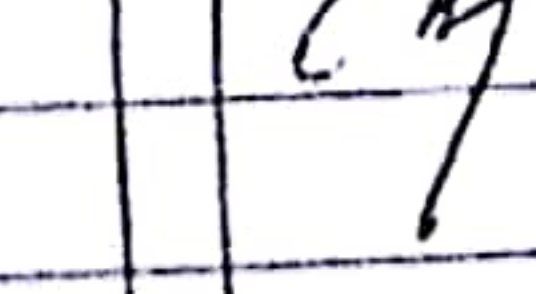
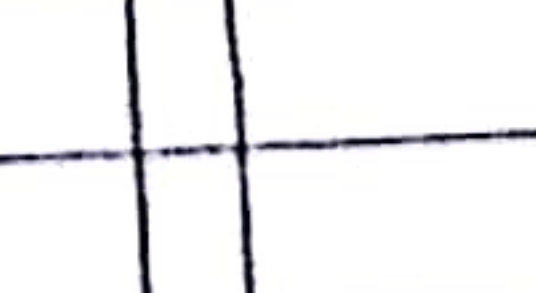
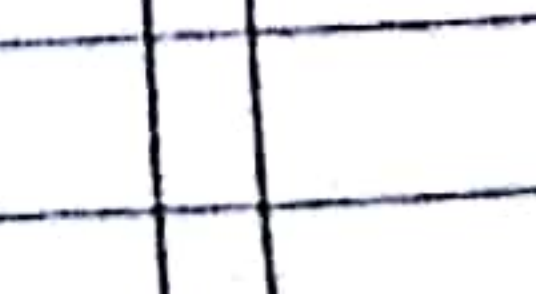
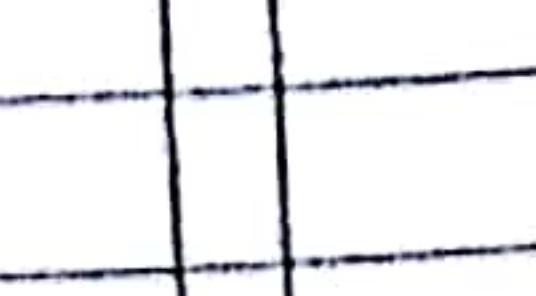



Supagiono

Nofulen



Indah Suelowati

DAFTAR NADIR SOSIALISASI PLPBK LATIUTAH
 HARI / TANGGAL : Jumat / 30 Oktober 2015
 TEMPAT : RUMAH BPK. SUPAGIONO

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TAMBA TANDA
1	H. MUZAMIL	RT 17 RW 06	Tani	
2	LIAMAT SAICH	RT 16 RW 06		
3	MUKASIM	RT II RW I		
4	Suwaji	RT 16 RW 06	Anggota	
5	Hosen	"	"	
6	Sudono	RT 16 RW 6	Karanggeger	
7	SUPAGIONO	RT 16 RW 06	"	
8	HADISUKI	RT 2	"	
9	NANIK	RT 16 Noho	"	
10	Umi Azias	RT 16 RW 06	"	
11	AGUS SETYAMINGGI	RT 02 RW 01	"	
12	Dodi Fachrudin	Jalan Kojan 2	"	
13	Bilamin	RT 13	Karanggeger	
14	ABD ARIS	RT 12	LKM	
15	MOH. SUDJAK	RT 7	"	
16	HERLINA	RT 02 RW 01	"	
17	ABD WAHAB	"	PERANGKAI	
18	Khairul Anis	RT 13	UPK	
19	SUPANDI	RT 17	LKM	
20	Heris	RT 4	"	
21	Miftahul Jannah	RT 01	TIPP	
22	ISMAIL	RT 12 / 05	"	
23	Nur Inayah	RT 16 / 06	"	
24	ANDIK	"	"	
25	Inah Sunlowah	RT 01 RW 01	Selekt	
26	AMIR LUKMAN	RT 4 ' 2	PERANGKAT	

MATRIK 4 : Rencana Investasi Penambahan Hasil Baseline 100 D 100 di RT Yang Masuk Lokasi Kawasan Prioritas RTPLP

NO	RENCANA INVESTASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA	LOKASI	TAHUN
1	plat deker	25	M	Rp 54,000,000	RT 16 RW 06 Dsn Nokotlogo	2015-2016
2	penyulingan air	3	unit	Rp 200,000,000	RT 16-17 RW 06 Dsn Nokotlogo	2015-2016
3	peningkatan kualitas air baku dan jaringan pipa distribusi	3	unit	Rp 150,000,000	RT 16-17 RW 06 Dsn Nokotlogo	2015-2016
4	RTLH	1	unit	Rp 15,000,000	RT 16 RW 06 Dsn Nokotlogo	2015-2016
5	plengsengan tlogo	165	m	Rp 39,600,000	RT 17 RW 06 Dsn Nokotlogo	2015-2016
6	RTH	2	titik	Rp 100,000,000	RT 16-17 RW 05 Dsn Nokotlogo	2015-2016
7	plengsengan noko	124	m	Rp 59,520,000	RT 16 RW 06 Dsn Nokotlogo	2015-2016
Jumlah Total				618,120,000		

Kepala Desa Karanggeger
(Bawon Santoso)

Tim Review RTPLP
(Supagiono)



Probolinggo, 03 November 2015
LKM Barokah
(Mudji Hadiono, SP.MM)



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENATAAN LINGKUNGAN
PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS**



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

DAN

**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
PROPINSI JAWA TIMUR**

Nomor : Ag./PKS/cb/2014
Nomor : 181/2014/426.12/2014

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENATAAN LINGKUNGAN
PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS**

Pada hari ini, tanggal 27 Bulan April Tahun Dua Ribu Empat Belas (2014-2014), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **ADJAR PRAJUDI** : Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/KPTS/M/2014 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Eselon II di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Tanggal 22 Januari 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Cipta Karya, beralamat di Jalan Patimura Nomor 20 Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **HJ. P. TRANTRIANA SARI, SE:** Bupati Probolinggo, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-120 Tanggal 06 Bulan Februari Tahun 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Probolinggo Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten Probolinggo, beralamat di Jalan Panglima Jendral Soedirman Nomor 131 Kraksaan Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan latar belakang perjanjian kerjasama ini, sebagai berikut :

1. Kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP/PNPM Mandiri Perkotaan) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sosial masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan dan pemerintah daerah.
2. Pendekatan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berorientasi untuk membangun transformasi menuju masyarakat mandiri melalui pembelajaran kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli untuk mengakses berbagai peluang dan sumber daya.
3. Perwujudan masyarakat mandiri menuju madani diperlukan proses pembelajaran masyarakat melalui Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK).
4. Untuk melaksanakan kegiatan PLPBK, diperlukan dukungan dari pemerintah daerah

Dengan memperhatikan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010 – 2014;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/M/2010 tentang Pedoman Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
8. Keputusan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian pekerjaan Umum Nomor KJ-02-09-cb/655 tanggal 19 Maret 2012 tentang penetapan Lokasi Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Wilayah I Tahun 2012;
9. Project Appraisal Document (PAD) No. 52915-BR Third National Program for Community Empowerment in Urban Areas, March 2, 2010;
10. Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan; dan
11. Pedoman Teknis Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama dalam rangka melaksanakan Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas, dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan PLPBK.
- (2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk mengupayakan penataan lingkungan permukiman yang berbasis komunitas melalui :
 - a. Kegiatan penyusunan perencanaan partisipatif di kelurahan yang menghasilkan dokumen Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) Kawasan Prioritas;
 - b. Kegiatan pemasaran atas hasil dokumen RTPLP Kawasan Prioritas untuk dapat dibiayai oleh pihak-pihak yang berminat; dan
 - c. Kegiatan pelaksanaan fisik sesuai hasil kegiatan perencanaan partisipatif.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Tugas dan tanggung jawab;
- b. Pelaksanaan;
- c. Pembiayaan; dan
- d. Jangka waktu.

**BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab :
 - a. Mengalokasikan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kegiatan PLPBK sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk masing-masing lokasi yang pencairannya dilakukan 2 (dua) tahap, sesuai ketentuan penyaluran yang ditetapkan dalam Pedoman Teknis PLPBK;
 - b. Memberikan pembinaan teknis yang diperlukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan PLPBK;
 - c. Melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan kegiatan PLPBK; dan
 - d. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan PLPBK secara nasional termasuk progress fisik dan keuangan.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab :
 - a. Mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan Lokakarya, Bantuan Operasional Pendukung (BOP) kegiatan PLPBK;
 - b. Mengalokasikan dana bantuan sosial dan/atau kegiatan sesuai dengan hasil perencanaan partisipatif sebesar 50% (lima puluh persen) dari BLM kegiatan PLPBK;
 - c. Membantu dan mengesahkan Tim Teknis Pemerintah Kabupaten untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PLPBK;

- d. Melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan kegiatan PLPBK; dan
- e. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan PLPBK termasuk progress fisik dan keuangan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

Dalam melaksanakan kegiatan PLPBK, maka :

- a. PIHAK KESATU dilakukan oleh Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
- b. PIHAK KEDUA dilakukan oleh Dinas PU. Cipta Karya Kabupaten Probolinggo.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal perjanjian ini ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah serta diakhiri dengan persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Pihak yang berminat untuk memperpanjang perjanjian kerjasama ini sebelum berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama Berakhir.

BAB VI PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum melalui Penataan Bangunan dan Lingkungan;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo yang dialokasikan pada Pengguna Anggaran Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.
- (2) Dana pelatihan PLPBK dapat digunakan/dimanfaatkan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 meliputi pembinaan teknis, monitoring dan supervisi, evaluasi kinerja, bantuan teknis dan dukungan data yang dibutuhkan.
- (3) Apabila terdapat kegiatan lain selain penggunaan/pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui persetujuan PARA PIHAK.

BAB VII KEADAAN KAHAR

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK dapat menunda atau membebaskan kewajiban masing-masing PIHAK bila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia/keadaan kahar.
- (2) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender

setelah terjadinya keadaan kahar disertai bukti-bukti yang layak adanya keadaan kahar dan akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing PIHAK.

- (3) Keterlambatan memberitahukan terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) akan mengakibatkan tidak diterimanya alasan keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada (1) adalah bencana alam (gempa bumi, banjir, topan, tanah longsor), sabotase, huru hara, pemberontakan yang jelas dinyatakan oleh instansi berwenang.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ada hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya ke pengadilan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 9

- (1) Perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam perubahan yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau aturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan dibicarakan lebih lanjut oleh PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

BAB X PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

